



**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang

Email: dikpora@pandeglangkab.go.id

Website <http://dikpora.pandeglangkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 disusun dengan menampilkan informasi/gambaran keadaan kondisi dan pencapaian kinerja pada tahun 2025. Kami merasa bahwa Laporan yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami terima.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ini, kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pandeglang, Januari 2026

↳ Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga
Kabupaten Pandeglang


H. DIDIN PAHRUDIN, Sos., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP 197001041995031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Isu Strategis	35
1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	37
1.5. Landasan Hukum	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026	41
2.1.1 Visi	41
2.1.2 Misi	41
2.1.3 Tujuan	42
2.1.4 Sasaran	43
2.2. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029	15
2.2.1 Visi	44
2.2.2 Misi	44
2.2.3 Tujuan	45
2.2.4 Sasaran	46
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	62
2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 2025	69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 (sasaran 2021-2026)	73
3.2. Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 (sasaran 2025-2029)	74
3.3. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	94
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	111
3.5. Prestasi yang diraih Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2025	114
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	117
4.2. Saran	117
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 1.1	Rekapitulasi PNS Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pada Tingkat Kabupaten Pandeglang	37
TABEL 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Per Jenjang Pendidikan	38
TABEL 1.3	Pegawai Berdasarkan status	38
TABEL 2.1	Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja	49
TABEL 2.2	Program Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025	51
TABEL 2.3	Capaian Indikator 2025 terhadap Target Kinerja Utama 2030	62
TABEL 2.4	Capaian Indikator 2025	62
TABEL 2.5	Target Kinerja Kunci Tahun 2025-2030	64
TABEL 2.6	Capaian Indikator 2025 terhadap Target Kinerja Kunci Akhir	66
TABEL 2.7	Sasaran Strategis, Indikator dan Target Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2025	69
TABEL 2.8	Sasaran Program, Indikator dan Target Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2025	71
TABEL 3.1	Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	73
TABEL 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025	78
TABEL 3.3	Capaian Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	79
TABEL 3.4	Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dan Tahun 2025	86
TABEL 3.5	Capaian Kinerja Tahun ini dengan Akhir Periode	89
TABEL 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional	92
TABEL 3.8	Realisasi Anggaran	94
TABEL 3.9	Program dan Kegiatan	96
TABEL 3.10	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	110
TABEL 3.11	Analisis Efisiensi	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Pandeglang dibidang pendidikan. Pada era Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara efektif telah melaksanakan otonomi daerah dengan melakukan penataan kelembagaan atau pembentukan Lembaga Perangkat Daerah termasuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang adalah lembaga yang mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan fungsi - fungsi pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan dibidang pendidikan wajib mempertanggung-jawabkan tugas pokok dan fungsinya secara periodik melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggung-jawaban sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. bahwa laporan kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial menitik beratkan pada efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitik beratkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai misi organisasi.

Sedangkan Akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar dalam pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat disajikan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga serta pentingnya pengungkapan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan masyarakat.

Dengan demikian dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung-jawab pada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan

efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan keluaran (*outputs*) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (*result/outcomes*) yang diperoleh.

Akuntabilitas kinerja yang dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan harus pula mampu menyajikan penjelasan tentang deviasi antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang kedudukan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan pendidikan usia dini, non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama Kepemudaan dan Olahraga, dan ketenagaan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **KEPALA DINAS**

- 1) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi yang terdiri dari:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan pendidikan usia dini, non formal, pendidikan sekolah

- dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan-bahan RPJMD, RKPD, LPPD dan LKPJ dalam bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- b. menyusun dan menetapkan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- c. menyusun data dan informasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui Sistem Aplikasi di lingkungan Dinas;
- d. merumuskan bahan penyusunan Bezzeting pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan penyusunan formasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkungan Dinas;
- g. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan PD lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- i. merumuskan dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;
- j. merumuskan dan melaksanakan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga;

- k. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran administrasi keuangan dan aset daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan Dinas;
- l. menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Dinas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. menyampaikan Laporan Keuangan Dinas;
- n. membagi tugas dan membina serta menilai bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- p. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasanan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

❖ **SEKRETARIAT**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pengelolaan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- f. melaksanakan perencanaan, koordinasi, penatausahaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan umum yang meliputi keprotokolan, humas, rapat-rapat dinas, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan, urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, kebersihan, ketertiban, pengelolaan BMD, sarana prasarana, administrasi perkantoran, tata kelola kepegawaian, diklat, penilaian kinerja, pembinaan dan kedisiplinan pegawai;
- g. mengoordinasikan kegiatan antar bidang dalam lingkup Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas;
- i. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan tata naskah dinas;

- j. menyelenggarakan pembinaan di bidang kepegawaian;
- k. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Dinas;
- l. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Sekretariat; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, pengelolaan kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, program kerja dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum, perencanaan, keuangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyusun dan melaksanakan perencanaan dan pengadaan barang jasa berdasarkan kebutuhan;
- e. mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan penatausahaan barang;

- f. melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
- g. melaksanakan pemeliharaan mebelair, peralatan dan mesin lainnya yang menjadi kewenangan Dinas;
- h. melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang menjadi kewenangan Dinas;
- i. melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris/persediaan;
- k. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu pada Dinas;
- l. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi pada Dinas;
- m. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis dan perpustakaan pada Dinas;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas;
- o. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- p. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan Dinas;
- q. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- s. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- t. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

- u. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Kode Etik, *Standard Operating Procedures (SOP)*, serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- w. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Dinas;
- y. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan, anggaran belanja Dinas;
- z. melaksanakan penyusunan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan realisasi dan penyerapan anggaran keuangan Dinas;
 - a) menyiapkan bahan penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
 - b) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - c) melaksanakan pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan Dinas, dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha; dan

- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

- 1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sekolah Dasar.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - h. pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum serta tata kelola Sekolah Dasar;
- d. menyusun bahan fasilitasi penjaminan mutu Sekolah Dasar;
- e. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar nasional pendidikan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar;
- g. menyusun kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- h. menyusun kalender pendidikan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar serta melaksanakan verifikasi dokumen kurikulum Sekolah Dasar sesuai dengan kurikulum nasional;
- i. mengembangkan evaluasi hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar;
- j. mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasana Sekolah Dasar berdasarkan tingkat kerusakan;
- l. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan pemeliharaan sarana prasarana Sekolah Dasar;
- m. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan implementasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar;
- n. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan implementasi sekolah penggerak, sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan sekolah sehat jenjang Sekolah Dasar;
- o. menyusun bahan pertimbangan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
- p. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kurikulum Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengembangkan kurikulum Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar;
- b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi pengembangan kurikulum Sekolah Dasar;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar;
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan Sekolah Penggerak dan Sekolah Ramah Anak jenjang Sekolah Dasar; dan
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan kurikulum Sekolah Dasar.

Rincian tugas Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
- b. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Sekolah Dasar;
- c. mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum serta tata kelola Sekolah Dasar;
- d. melaksanakan verifikasi dokumen kurikulum Sekolah Dasar sesuai dengan kurikulum nasional;
- e. mensosialisasikan dan mengimplementasikan standar nasional pendidikan;
- f. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum Sekolah Dasar;

- g. melaksanakan sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan pengimbasan Sekolah Penggerak dan Sekolah Ramah Anak jenjang Sekolah Dasar;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar;
- i. menyusun kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- j. menyusun kalender pendidikan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar;
- k. mengembangkan evaluasi hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar;
- l. mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- m. menyusun laporan pencapaian kurikulum secara berkala;
- n. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- b. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat jenjang Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya

Rincian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasarana Sekolah Dasar berdasarkan tingkat kerusakan;
- c. melaksanakan sinkronisasi data kerusakan sarana prasarana Sekolah Dasar dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan gedung, rumah dinas, ruang kelas, laboratorium, ruang serba guna, perpustakaan dan sarana pendukung Sekolah Dasar;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana belajar siswa, alat pembelajaran, alat praktik dan alat peraga Sekolah Dasar;
- f. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi sarana prasarana Sekolah Dasar;
- g. melaksanakan sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan pengimbasan Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat jenjang Sekolah Dasar;
- h. menyusun laporan kondisi sarana prasarana Sekolah Dasar secara berkala
- i. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

- 1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- h. pembinaan Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat di satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- b. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum serta tata kelola Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun bahan fasilitasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Pertama;

- e. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar nasional pendidikan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- g. menyusun kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- h. menyusun kalender pendidikan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar;
- i. melaksanakan verifikasi dokumen kurikulum Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kurikulum nasional;
- j. mengembangkan evaluasi hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- k. mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan tingkat kerusakan;
- m. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan pemeliharaan sarana prasarana Sekolah Menengah pertama;
- n. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan implementasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama;
- o. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan implementasi sekolah penggerak, sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan sekolah sehat jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- p. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengembangkan kurikulum Sekolah

Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan pengembangan Sekolah Penggerak dan Sekolah Ramah Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan kurikulum Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- b. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- c. mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar nasional pendidikan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- f. menyusun kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- g. menyusun kalender pendidikan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar serta melaksanakan verifikasi dokumen kurikulum Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kurikulum nasional;
- h. mengembangkan evaluasi hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- i. mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- k. melaksanakan sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan pengimbasan Sekolah Penggerak dan Sekolah Ramah Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- l. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- m. menyusun laporan pencapaian kurikulum secara berkala; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat jenjang Sekolah Menengah Pertama; dan
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Rincian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan tingkat kerusakan;
- c. melaksanakan sinkronisasi data kerusakan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan gedung, rumah dinas, ruang kelas, laboratorium, ruang serba guna, perpustakaan dan sarana pendukung Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana belajar siswa, alat pembelajaran, alat praktik dan alat peraga Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- g. melaksanakan sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan pengimbasan Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- h. menyusun laporan kondisi sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama secara berkala;
- i. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

- 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengembangkan kurikulum, dan pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - g. pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - h. pembinaan Sekolah Penggerak dan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum serta tata kelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. menyusun bahan fasilitasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar nasional pendidikan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. menyusun kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. menyusun kalender pendidikan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar;
- i. melaksanakan verifikasi dokumen kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kurikulum nasional;
- j. mengembangkan evaluasi hasil belajar peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- k. mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berdasarkan tingkat kerusakan;
- m. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- n. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan implementasi penerimaan peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- o. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan implementasi sekolah penggerak dan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- p. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengembangkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan Sekolah Penggerak dan pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Rincian tugas Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- d. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar nasional pendidikan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. menyusun kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. menyusun kalender pendidikan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar serta melaksanakan verifikasi dokumen kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kurikulum nasional;
- h. mengembangkan evaluasi hasil belajar peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- i. mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- k. melaksanakan sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan pengimbasan Sekolah Penggerak dan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- l. menyusun laporan pencapaian kurikulum secara berkala;
- m. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- A. penyusunan bahan kebijakan pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- B. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- C. pelaksanaan kebijakan pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- D. pelaksanaan kebijakan pengembangan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- E. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Rincian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berdasarkan tingkat kerusakan;
- c. melaksanakan sinkronisasi data kerusakan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan gedung, rumah dinas, ruang kelas, laboratorium, ruang serba guna, perpustakaan dan sarana pendukung Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana belajar siswa, alat pembelajaran, alat praktik dan alat peraga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- g. melaksanakan sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan pengimbasan Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. menyusun laporan kondisi sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal secara berkala
- i. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

- 1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF.
- 3) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
 - b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
 - c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
 - d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
 - e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;

- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang yang merupakan kewenangan Daerah;
- c. menyusun, mempersiapkan dan mengusulkan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan diajukan untuk mendapatkan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. merencanakan, melaksanakan dan mempersiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagaan;
- j. melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;

- k. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Kepala Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- c. pelaksanaan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;

- b. menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- c. menyusun, mempersiapkan dan mengusulkan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan diajukan untuk mendapatkan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mempersiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- f. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Kepala Seksi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;

- b. pelaksanaan kegiatan urusan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Seksi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- b. menyusun rencana Penataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- e. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF;

- g. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan PNF; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **BIDANG PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

- 1) Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengembangkan pembinaan kepemudaan dan pembinaan olahraga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- 3) Kepala Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga;a
- b. melaksanakan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- c. melaksanakan verifikasi keberadaan seksi/kelembagaan pemuda/OKP sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pemberdayaan, pengembangan perhimpunan pemuda;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia pemuda dan pendataan potensi kepemudaan;
- f. melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga;

- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan dan olahraga;
- h. melaksanakan penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dan olahraga;
- i. menyusun rancangan pola kemitraan antara pemuda dan masyarakat;
- j. melaksanakan perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda dan olahraga;
- l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas pemuda dan olahraga dengan instansi/pihak lain;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas pemuda dan olahraga;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kelembagaan pemuda dan olahraga; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Pembentukan, rincian tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

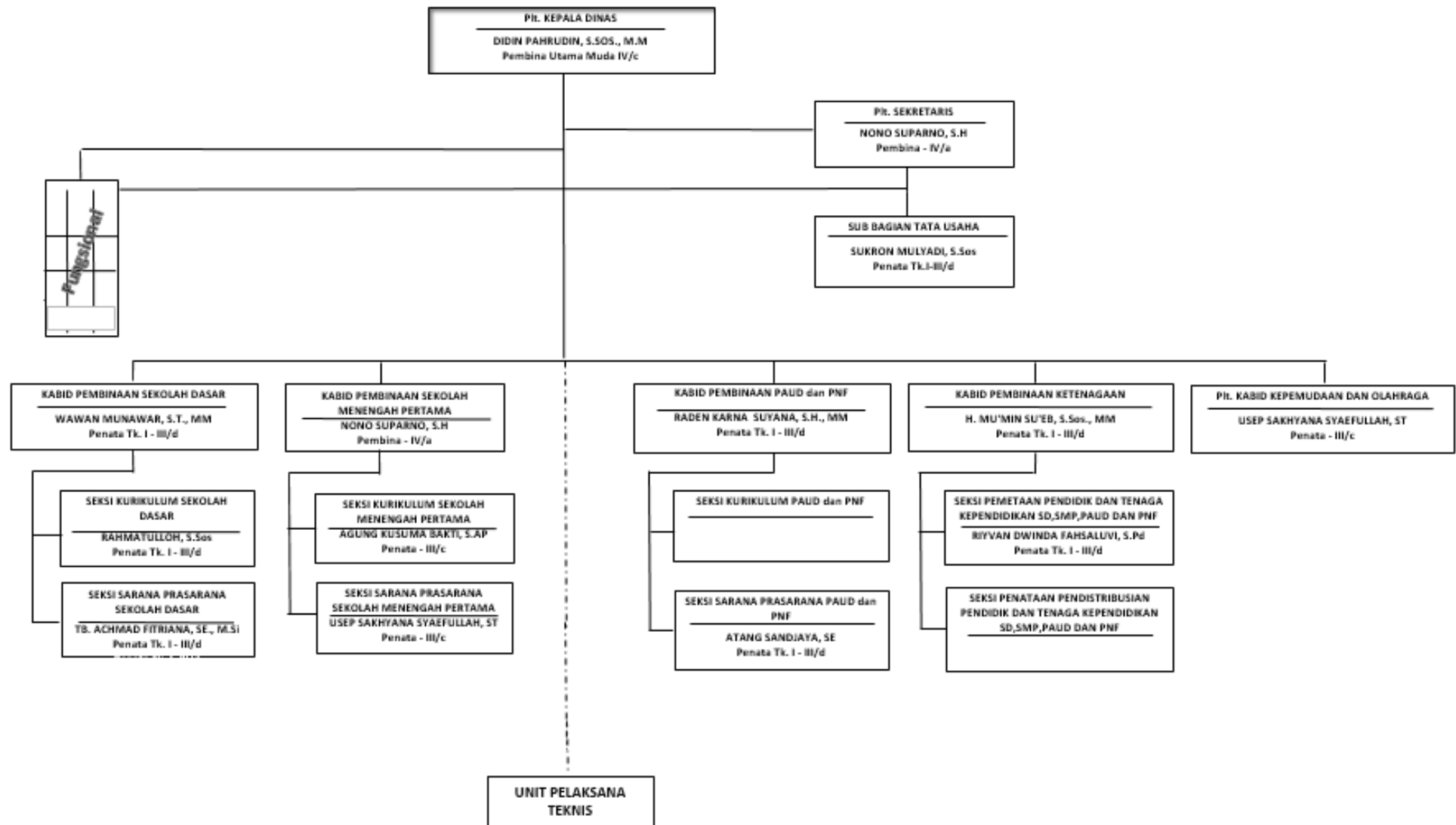
❖ **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Koordinator mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
4. Kelompok Jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.
5. Ketentuan mengenai pembagian tugas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang



1.3 Isu Strategis Organisasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Disdikpora Kabupaten Pandeglang	Permasalahan Disdikpora Kabupaten Pandeglang	Isu KLHS yang Relevan dengan Disdikpora Kabupaten Pandeglang	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Disdikpora Kabupaten Pandeglang			Isu Strategis Disdikpora Kabupaten Pandeglang
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
<p>a. Tersedianya sumber daya manusia pendidikan (guru, tenaga kependidikan) yang tersebar di seluruh wilayah</p> <p>b. Jumlah satuan pendidikan formal PAUD, SD, SMP reguler dan pendidikan nonformal yang tersedia</p> <p>c. Antusiasme generasi muda dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan</p> <p>d. Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pendidikan sebagai pelayanan dasar wajib</p> <p>e. Dukungan APBD dan potensi CSR dari BUMD serta lembaga lainnya</p>	<p>a. Masih terdapat kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah pelosok</p> <p>b. Tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS)</p> <p>c. Ketimpangan distribusi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>d. Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi/kegiatan produktif</p> <p>e. Kurangnya fasilitas olahraga yang layak dan representatif</p>	<p>a. Akses pendidikan inklusif dan setara untuk semua anak (termasuk disabilitas)</p> <p>b. Ketahanan dan adaptasi pendidikan terhadap dampak perubahan iklim (kebencanaan)</p> <p>c. Pengurangan kemiskinan melalui pendidikan</p> <p>d. Pengelolaan lingkungan sekolah yang berkelanjutan (Program Adiwiyata)</p>	Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan (AI, <i>digital learning</i>)	Transformasi digitalisasi pendidikan, penguatan karakter & antikorupsi	Kearifan lokal dalam kurikulum, pendidikan berbasis budaya Pandeglang, pengembangan SDM unggul menyongsong Pandeglang Emas	<p>a. Pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal</p> <p>b. Penanganan siswa putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS)</p> <p>c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusif dan ramah anak</p> <p>d. Pemenuhan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan guru serta</p>

							tenaga kependidikan e. Sinergi lintas sektor untuk peningkatan layanan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga
--	--	--	--	--	--	--	--

1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur (personil) dilingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tenaga Administrasi

1. Pegawai Tingkat Kabupaten Pandeglang

Jumlah Pegawai tingkat Kabupaten Pandeglang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 41 Orang
- b. PPPK : 4 Orang
- c. PPPK ParuhWaktu : 38 Orang
- Jumlah : 83 Orang

Di bawah ini adalah rekapitulasi data PNS yang diolah dari daftar urutan Kepegangatan Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Kabupten Pandeglang 2025

Tabel 1.1
Rekapitulasi PNS Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pada Tingkat Kabupaten Pandeglang

NO	Rekap Berdasarkan Golongan				Rekap Berdasarkan Pendidikan			
		=				=		
1	Pembina Utama Muda – IV c	=	1	Orang	S3	=	0	Orang
2	Pembina Tingkat I – IVb	=	0	Orang	S2	=	7	Orang
3	Pembina – IV a	=	5	Orang	S1	=	30	Orang
4	Penata Tk.I – IIIId	=	9	Orang	D3	=	1	Orang
5	Penata – IIIc	=	7	Orang	D2	=	0	Orang
6	Penata Muda Tk.I – IIIb	=	7	Orang	D1	=	0	Orang
7	Penata muda – IIIa	=	3	Orang	SLTA	=	7	Orang
8	Pengatur Tk.I-IIId	=	1	Orang	SMP		0	Orang
9	Pengatur – II/c	=	5	Orang				
10	Pengatur Muda Tk.I-IIb	=	3	Orang				
11	Pengatur Muda-IIa	=	0	Orang				
12	Juru Tingkat I- Id		0	Orang				
13	IX	=	4	Orang				
14	Paruh Waktu	=	38	Orang				

	Jumlah		83			83	
--	--------	--	----	--	--	----	--

Adapun Jumlah pegawai Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang menurut kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Per Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Pria		Wanita		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
SD	0	0%	0	0%	0	0%
SLTP	0	0%	0	0%	0	0%
SLTA	23	28%	1	1%	24	29%
DI	0	0%	0	0%	0	0%
DII	0	0%	0	0%	0	0%
DIII	2	2%	0	0%	2	2%
S1	30	36%	20	24%	50	60%
S2	7	8%	0	0%	7	8%
S3	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	62	75%	21	25%	83	100%

Berdasarkan table di atas, bahwa pegawai laki laki lebih dominan dengan jumlah 75% sedangkan pegawai perempuan sebanyak 25% ini menandakan belum adanya kesetaraan gender. Dilihat dari tingkat pendidikan jumlah pegawai yang berijazah S1 ke bawah lebih dominan dengan jumlah 60%. Hal tersebut meunjukkan kualifikasi pendidikan SDM di tingkat kabupaten sudah sesuai harapan. Sedangkan menurut status dapat dilihat dari table sebagai berikut

Tabel 1.3
Pegawai Berdasarkan status

Pendidikan	Pria		Wanita		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
PNS	34	41%	7	8%	41	49%
PPPK	2	2%	2	2%	4	5%
PPPK Paruh Waktu	28	34%	10	12%	38	46%
Jumlah	64	78%	19	24%	83	102%

Jumlah Pegawai menurut status dan jenis kelamin dari table di atas terlihat pegawai berstatus PNS sebesar 49% ini berarti sebagian besar pegawai cukup memenuhi kebutuhan kinerja bahwa sebagian besar pegawai sudah menguasai teknis administrasi perkantoran.

2. Pegawai Tingkat Kecamatan (UPTD Pendidikan/Koordinator Administrasi)

Pegawai tingkat kecamatan Pandeglang (UPTD Pendidikan) di bawah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang secara umum dapat terlihat sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil	=	45 Orang
- PPPK	=	5 Orang
- PPPK Paruh Waktu	=	116 Orang
Jumlah	=	166 Orang

Di bawah ini adalah rekapitulasi data PNS yang di olah dari database kondisi tahun 2025 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENJANIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

2.1.1. Visi

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang sebagai Lembaga yang melaksanakan urusan pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan di Daerah Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pelayanan dan peningkatan mutu terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dasar dan manajemen pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut aparatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang memiliki nilai-nilai integritas dan independensi serta loyalitas kepada Bangsa dan Negara. Visi yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang.

Dengan memperhatikan visi Kabupaten Pandeglang 2021-2026 yaitu “Pandeglang Berkah, Berdaya Saing dan Sejahtera”, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang akan berupaya semaksimal mungkin sesuai potensi sumber daya yang ada.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang menetapkan Visi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang harus dilaksanakan, yaitu : **“Menuntaskan wajib belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun melalui pemerataan akses layanan pembelajaran dan mutu satuan pendidikan”**

2.1.2. Misi

Berikut adalah misi RPJMD 2021-2026:

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah.

Sedangkan untuk misi OPD adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pemerataan akses layanan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Pendidikan kesetaraan.
- b. Meningkatnya perlindungan hak Pendidikan anak rentan putus sekolah dasar dan sekolah menengah yang berkontribusi terhadap angka partisipasi Pendidikan Menengah dan tinggi
- c. Meningkatnya pemenuhan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten unggul dan berkarakter
- d. Terwujudnya daya saing kepemudaan yang kreatif dan inovatif berlandaskan kearifan local dan karakteristik Pandeglang sebagai Kota sejuta santri Seribu Ulama
- e. Terwujudnya pembinaan olahraga secara berjenjang, berkelanjutan , produktif dan berprestasi

2.1.3. Tujuan

Tujuan 1: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pemerataan akses layanan pendidikan menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang. Tujuan ini diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh layanan pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas sejak usia dini hingga pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan nonformal.

Tujuan 2: Perlindungan Hak Pendidikan Anak Rentan Putus Sekolah

Perlindungan terhadap hak pendidikan anak rentan putus sekolah menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Tujuan ini difokuskan pada pencegahan putus sekolah pada jenjang SD dan SMP, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.

Tujuan 3: Pengembangan Inovasi Pemuda

Pengembangan inovasi pemuda menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar, mahasiswa, serta kelompok disabilitas sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang adaptif dan produktif.

Tujuan 4: Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan kelompok disabilitas di berbagai tingkat kompetisi.

2.1.4. Sasaran

Dalam mendukung tujuan, maka ditetapkan beberapa sasaran, yaitu:

1. sasaran meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Upaya pencapaiannya dilakukan melalui strategi pemerataan kuantitas dan kualitas satuan PAUD di setiap desa dan kelurahan, sehingga anak usia 4–6 tahun memperoleh hak pendidikan secara optimal. Selain itu, peningkatan dan pemerataan kualitas satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terus didorong guna memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak usia 7–15 tahun.
2. Sasaran meningkatnya perlindungan hak pendidikan anak rentan putus sekolah. Strategi yang ditempuh antara lain melalui penyediaan sistem pembelajaran yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan guna menjamin mutu layanan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah memperkuat ketersediaan dan validitas data siswa calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai dasar penetapan kebijakan bantuan pendidikan yang tepat sasaran.
3. Sasaran terwujudnya inovasi pelajar, mahasiswa, dan kelompok disabilitas. Strategi yang diterapkan melalui pemerataan pelaksanaan lomba inovasi di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan lomba inovasi pelajar, mahasiswa, dan kelompok disabilitas di 35

kecamatan sebagai wadah aktualisasi ide, kreativitas, dan solusi inovatif yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

4. Sasaran meningkatnya prestasi olahraga di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga secara berjenjang, didukung dengan arah kebijakan berupa penguatan kerja sama antara organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi.

2.2. Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029

2.2.1. Visi

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang sebagai Lembaga yang melaksanakan urusan pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan di Daerah Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pelayanan dan peningkatan mutu terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dasar dan manajemen pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut aparatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang memiliki nilai-nilai integritas dan independensi serta loyalitas kepada Bangsa dan Negara.

Dengan memperhatikan visi Kabupaten Pandeglang 2025-2029 yaitu “Pandeglang Maju Melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera”, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang akan berupaya semaksimal mungkin sesuai potensi sumber daya yang ada.

2.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029, maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran, arah kebijakan, rencana kerja, penganggaran dan program prioritas pembangunan daerah. Sebagai bentuk kesinambungan perencanaan dan akuntabilitas politik, penyusunan misi dalam RPJMD ini berpedoman pada misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih sebagaimana disampaikan saat

pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pandeglang. Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang pada saat pendaftaran menyampaikan empat misi utama pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan akses infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas, pendidikan, kesehatan, perekonomian unggulan, dan resiliensi bencana;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan kemandirian fiskal, kemudahan investasi, dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan UMKM Pondok Pesantren;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing sumber daya manusia melalui penurunan kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga masuk ke dalam misi kedua Kabupaten Pandeglang, yaitu: "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM melalui penurunan kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting".

2.2.3. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Meningkatkan Intelektualitas dan Karakter anak usia sekolah serta Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta penguatan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga merupakan bagian penting dalam mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Pandeglang yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai positif yang mendukung terciptanya masyarakat yang produktif dan berintegritas.

Upaya peningkatan intelektualitas anak usia sekolah dilakukan melalui penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, mulai dari

pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar dan menengah. Selain peningkatan mutu pembelajaran, penguatan pendidikan karakter menjadi fokus utama untuk menanamkan nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas sejak dini. Dengan demikian, anak usia sekolah diharapkan mampu berkembang secara optimal, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter.

Sejalan dengan itu, peran pemuda dalam pembangunan daerah terus didorong melalui pengembangan kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif dalam berbagai bidang. Pemuda diposisikan sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan daerah. Fasilitasi kegiatan inovasi, kepemudaan, serta ruang-ruang partisipasi menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Di bidang olahraga, peningkatan prestasi menjadi bagian integral dari pembinaan generasi muda yang sehat, disiplin, dan berdaya saing. Pembinaan olahraga dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui upaya tersebut, diharapkan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan pemuda Kabupaten Pandeglang dapat meningkat di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional, sekaligus memperkuat citra dan kebanggaan daerah.

2.2.4. Sasaran

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki 4 sasaran yaitu:

1. **Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi**

Peningkatan partisipasi pemuda dalam kemandirian ekonomi merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat daya saing daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemuda memiliki potensi besar sebagai pelaku usaha, inovator, dan penggerak ekonomi lokal yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pencapaian tujuan ini diarahkan pada penguatan kapasitas dan keterampilan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan kompetensi kerja, serta fasilitasi akses terhadap permodalan,

pasar, dan teknologi. Selain itu, pembinaan dan pendampingan usaha bagi pemuda terus ditingkatkan guna mendorong lahirnya wirausaha muda yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing.

2. Meningkatnya Prestasi Keolahragaan

Peningkatan prestasi keolahragaan merupakan bagian integral dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Olahraga tidak hanya berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan disiplin, sportivitas, kerja keras, serta semangat berprestasi, khususnya bagi pelajar, pemuda, dan atlet daerah.

Upaya pencapaian tujuan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pembinaan olahraga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat pembibitan, pembinaan, hingga peningkatan prestasi. Dinas mendorong penguatan sistem pembinaan atlet melalui peningkatan kompetensi pelatih dan tenaga keolahragaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, serta peningkatan frekuensi dan kualitas keikutsertaan dalam kejuaraan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, peningkatan prestasi keolahragaan dilaksanakan melalui penguatan sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan dukungan pembinaan yang optimal dan kolaborasi yang kuat, diharapkan prestasi olahraga Kabupaten Pandeglang dapat terus meningkat serta mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Upaya pencapaian tujuan ini diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja yang

terintegrasi dan berbasis kinerja. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan secara selaras dengan indikator kinerja yang terukur, sementara pelaksanaan program didukung oleh pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Selain itu, peningkatan akuntabilitas kinerja didorong melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas data dan informasi kinerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses menjadi fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Upaya pencapaian tujuan ini diarahkan pada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkelanjutan. Di samping itu, penguatan manajemen satuan pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi terus didorong untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan.

Aksesibilitas pendidikan juga ditingkatkan melalui pemerataan ketersediaan layanan pendidikan pada seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kelompok masyarakat rentan. Pemerintah daerah mendorong perluasan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan kesetaraan, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Melalui peningkatan kualitas dan

aksesibilitas pendidikan, diharapkan terwujud peningkatan partisipasi sekolah dan capaian belajar peserta didik secara berkelanjutan.

TABEL 2.1.
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN					
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)
1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga										
- Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter anak usia sekolah serta Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,74	13,94	13,98	14,02	14,06	14,11	14,5
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,16	7,37	7,45	7,52	7,59	7,67	7,72
			Rata-Rata Skor Literasi (Angka)	59,60	61,40	63,20	65,00	66,80	68,60	70,40
			Rata-Rata Skor Numerasi (Angka)	54,91	57,11	59,31	61,51	63,71	65,91	68,11
			Persentase Pemuda yang Aktif dan Berperan dalam Pembangunan Daerah (%)	2,78	2,78	2,79	2,80	2,81	2,82	2,83
			Rasio Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Kabupaten (%)	5,16	5,16	5,41	5,65	5,90	6,14	6,39
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,66	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
		Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi (Angka)	85	100	115	130	145	150	155
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP OPD (Nilai)	71,40	71,50	71,60	71,70	71,80	71,90	72,00
		Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD ()	57,60	60,10	62,60	65,10	67,60	70,10	72,60
			Skor Literasi Membaca SMP ()	61,60	62,70	63,80	64,90	66,00	67,10	68,20
			Skor Numerasi SD ()	51,79	54,69	57,59	60,49	63,39	66,29	69,19

			Skor Numerasi SMP ()	58,03	59,53	61,03	62,53	64,03	65,53	67,03
			Persentase Capaian SPM Pendidikan (%)	65,15	72,23	73,23	74,23	76	78	80
			Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah (%)	28,57	28,77	28,97	29,17	29,37	29,57	29,77

1. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Program Pengembangan Kurikulum
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Penyeragaman, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impact/Outcome), Kegiatan (Outcome/Hasil), Sub Kegiatan (Output)	Target		Pagu		JUMLAH PERUBAHAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	100	1.286.178.504.286	1.243.493.376.447	(42.685.127.839)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	982.457.096.962	946.071.071.947	(36.386.025.015)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	37.300.000	82.740.000	45.440.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	5.500.000	7.550.000	2.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	6.400.000	1.400.000

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	4.200.000	700.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	4.900.000	1.400.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	4.800.000	50.050.000	45.250.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Berita Acara	2 Berita Acara	10.000.000	4.640.000	(5.360.000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	978.539.226.962	941.733.462.447	(36.805.764.515)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	14 Laporan	978.522.626.962	941.716.862.447	(36.805.764.515)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.100.000	3.100.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	13.500.000	13.500.000	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	22.100.000	22.100.000	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.100.000	22.100.000	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	426.250.000	655.245.900	228.995.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	18.860.000	18.860.000	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	19.295.000	301.195.900	281.900.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	1	Paket	256.955.000	19.295.000	(237.660.000)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	21.300.000	238.845.000	217.545.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	2	Paket	100.000.000	22.600.000	(77.400.000)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	12	Laporan	9.840.000	30.000.000	20.160.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1	Dokumen	3.312.220.000	24.450.000	(3.287.770.000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	100	%	188.000.000	3.209.623.600	3.021.623.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	396.000.000	196.400.000	(199.600.000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	2.728.220.000	446.000.000	(2.282.220.000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	12	Laporan	120.000.000	2.567.223.600	2.447.223.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	100	%	60.000.000	367.900.000	307.900.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	4	Unit	20.000.000	93.000.000	73.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	4	Unit	40.000.000	40.000.000	-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100	%	1	unit	303.158.142.824	234.900.000	(302.923.242.824)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	%	100	%	176.301.023.000	296.859.220.000	120.558.197.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	Ruang	100	%	1.092.550.000	173.659.212.000	172.566.662.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	74	Ruang	5	Ruang	2.235.815.000	1.094.350.000	(1.141.465.000)
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	31	Ruang	15	Ruang	3.431.700.000	2.219.449.500	(1.212.250.500)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	55	unit	15	Ruang	8.262.440.000	3.395.200.000	(4.867.240.000)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Ruang	50	unit	611.028.000	8.520.483.412	7.909.455.412
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21	Ruang	4	Ruang	2.450.560.000	601.699.500	(1.848.860.500)
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	465	Paket	15	Ruang	4.707.189.000	2.427.560.000	(2.279.629.000)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	860	Peserta Didik	181	Paket	950.000.000	4.872.617.000	3.922.617.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	871	Satuan Pendidikan	871	Peserta Didik	121.311.785.000	949.650.000	(120.362.135.000)
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	871	Satuan Pendidikan	873	Satuan Pendidikan	800.000.000	121.311.785.000	120.511.785.000

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 orang	873 Satuan Pendidikan	200.000.000	512.700.000	312.700.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	60 orang	598.100.000	237.055.000	(361.045.000)
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36 Ruang	9 Dokumen	9.798.950.000	570.650.000	(9.228.300.000)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	25 Ruang	2.190.830.000	9.990.553.295	7.799.723.295
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang	17 unit	9.863.130.000	1.906.288.000	(7.956.842.000)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	38 Ruang	6.279.690.000	13.409.595.293	7.129.905.293
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	52 Paket	### # Peserta Didik	1.517.256.000	152.320.000	(1.364.936.000)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah pertama	100 %	12 Paket	86.832.306.824	1.487.256.000	(85.345.050.824)
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	100 %	673.200.000	85.300.685.000	84.627.485.000
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	39 Ruang	3 Ruang	1.016.150.000	669.750.000	(346.400.000)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	174 Unit	2 Ruang	1.654.638.824	976.586.800	(678.052.024)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	12 Unit	19.651.630.000	1.996.850.000	(17.654.780.000)
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	128 Ruang	705.150.000	18.918.546.800	18.213.396.800

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	Ruang	3	Ruang	277.800.000	687.350.000	409.550.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	2	Ruang	1.927.325.000	539.000.000	(1.388.325.000)
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	140	Paket	21	Unit	5.056.250.000	1.830.432.500	(3.225.817.500)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.900	Peserta Didik	250	Paket	1.794.320.000	5.056.250.000	3.261.930.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.059	Peserta Didik	663	Peserta Didik	855.000.000	359.800.000	(495.200.000)
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20	Orang	916	Peserta Didik	70.000.000	855.000.000	785.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10	Orang	174	Orang	70.000.000	70.000.000	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	115	Satuan Pendidikan	174	Orang	245.000.000	70.000.000	(175.000.000)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	167	Satuan Pendidikan	174	Satuan Pendidikan	46.757.871.000	245.000.000	(46.512.871.000)
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	167	Orang	174	Satuan Pendidikan	300.000.000	46.757.871.000	46.457.871.000
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	500	Orang	672	Orang	250.500.000	300.000.000	49.500.000

	Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	Dokumen	672	Orang	226.000.000	250.500.000	24.500.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen	115	Dokumen	150.000.000	226.000.000	76.000.000
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	Ruang	174	Dokumen	1.506.800.000	150.000.000	(1.356.800.000)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	Ruang	5	Ruang	3.361.700.000	1.317.775.900	(2.043.924.100)
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10	Paket	14	Ruang	282.972.000	3.741.000.000	3.458.028.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	%	5	Paket	23.176.618.000	282.972.000	(22.893.646.000)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	21	Unit	100	%	1.428.450.000	23.019.309.000	21.590.859.000
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	18	Unit	13	Unit	441.294.000	1.702.239.000	1.260.945.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Sekolah PAUD Mengelola Dana BOP	100	Peserta Didik	27	Unit	103.395.000	408.906.345	305.511.345
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	733	Satuan Pendidikan	-	Peserta Didik	200.000.000	-	(200.000.000)
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	733	Satuan Pendidikan	285	Satuan Pendidikan	15.736.194.000	176.636.000	(15.559.558.000)
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	32	Orang	755	Satuan Pendidikan	250.000.000	15.736.194.000	15.486.194.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	2	Dokumen	135	Orang	95.500.000	219.450.000	123.950.000

	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10	Ruang	2	Dokumen	1.579.738.000	66.770.280	(1.512.967.720)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48	Unit	7	Ruang	907.875.000	1.571.715.775	663.840.775
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	48	Paket	8	Unit	1.227.122.000	816.187.000	(410.935.000)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	9	Paket	1.207.050.000	1.245.892.600	38.842.600
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	%	7	Ruang	16.848.195.000	1.075.318.000	(15.772.877.000)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200	Peserta Didik	100	%	22.095.000	14.880.014.000	14.857.919.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	Satuan Pendidikan	0	Peserta Didik	6.172.000.000	-	(6.172.000.000)
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	800	Lembaga	1143	Satuan Pendidikan	10.404.100.000	4.264.300.000	(6.139.800.000)
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32	Orang	46	Lembaga	250.000.000	10.404.100.000	10.154.100.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROSENTASE PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100	%	-	Dokumen	563.264.500	-	(563.264.500)
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	100	%	100	%	563.264.500	563.084.500	(180.000)

	Nonformal/Kesetaraan							
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	Dokumen	100	%	338.454.500	563.084.500	224.630.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	Laporan	3	Dokumen	224.810.000	408.939.500	184.129.500
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2	Laporan	4.884.206.000	154.145.000	(4.730.061.000)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100	%			4.884.206.000	4.984.206.000	100.000.000
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				100	%		4.984.206.000	4.984.206.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100	%			300.000.000		(300.000.000)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prosentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100	%	100	%	300.000.000	491.620.000	191.620.000

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	35	ORANG	100	%	100.000.000	491.620.000	391.620.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	27	ORANG	60	ORANG	200.000.000	200.000.000	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100	%	-	ORANG	4.584.206.000	-	(4.584.206.000)
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	300.000.000	4.492.586.000	4.192.586.000
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	35	orang	100	%	300.000.000	399.374.082	99.374.082
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	87	Unit	200.000.000	399.374.082	199.374.082
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	100	%	200.000.000	169.900.000	(30.100.000)
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100	%	2	Kegiatan	100.000.000	169.900.000	69.900.000

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	281 orang	100 %	100.000.000	100.000.000	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 %	46 orang	860.000.000	100.000.000	(760.000.000)
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	100 %	200.000.000	886.215.000	686.215.000
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	660.000.000	226.215.000	(433.785.000)
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0	3 Dokumen	-	660.000.000	660.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 %	100 %	3.124.206.000	2.937.096.918	(187.109.082)
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	4 Unit	3.000.000.000	2.812.890.918	(187.109.082)
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	13 Lembaga	13 Lembaga	124.206.000	124.206.000	-
				1.291.062.710.286	1.248.477.582.447	(42.585.127.839)

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.3

Target Kinerja Utama Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga								
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,16	7,37	7,45	7,52	7,59	7,67	7,72
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,74	13,94	13,98	14,02	14,06	14,11	14,5
4.	Rata-Rata Skor Literasi	Angka	59,60	61,40	63,20	65,00	66,80	68,60	70,40
5.	Rata-Rata Skor Numerasi	Angka	54,91	57,11	59,31	61,51	63,71	65,91	68,11
6.	Persentase Pemuda yang Aktif dan Berperan dalam Pembangunan Daerah	%	2,78	2,78	2,79	2,80	2,81	2,82	2,83
7.	Rasio Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Kabupaten	%	5,16	5,16	5,41	5,65	5,90	6,14	6,39
8.	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	Angka	85	100	115	130	145	150	155
9.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,40	71,50	71,6	71,70	71,80	71,90	72,00
10.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,66	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
11.	Skor Literasi Membaca SD		57,60	60,10	62,60	65,10	67,60	70,10	72,60
12.	Skor Literasi Membaca SMP		61,60	62,70	63,80	64,90	66,00	67,10	68,20
13.	Skor Numerasi SD		51,79	54,69	57,59	60,49	63,39	66,29	69,19
14.	Skor Numerasi SMP		58,03	59,53	61,03	62,53	64,03	65,53	67,03
15.	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	65,15	72,23	73,23	74,23	76	78	80
16.	Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	%	28,57	28,77	28,97	29,17	29,37	29,57	29,77

Tabel 2.4

Capaian Indikator 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025		
			TARGET	CAPAIAN	PROSENTASE
1.	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,37	7,50	102%
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,94	13,75	99%
4.	Rata-Rata Skor Literasi	Angka	61,40	63,69	104%
5.	Rata-Rata Skor Numerasi	Angka	57,11	62,64	110%

6.	Persentase Pemuda yang Aktif dan Berperan dalam Pembangunan Daerah	%	2,78	2,67	96%
7.	Rasio Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Kabupaten	%	5,16	47,03	911%
8.	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	Angka	100	103,00	103%
9.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,50	-	-
10.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,66	0,66	100%
11.	Skor Literasi Membaca SD		60,10	68,92	115%
12.	Skor Literasi Membaca SMP		62,70	58,46	93%
13.	Skor Numerasi SD		54,69	66,89	122%
14.	Skor Numerasi SMP		59,53	58,39	98%
15.	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	72,23	72,23	100%
16.	Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	%	28,77	19,25	67%

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS mencapai 99% dari target. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, indikator ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan relatif tinggi, namun masih terdapat tantangan pada faktor ekonomi dan sosial.

- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian RLS sebesar 7,50 tahun atau 102% dari target menunjukkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pemerataan layanan pendidikan formal dan nonformal.

- Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi

Literasi mencapai 104% dan Numerasi mencapai 110%, Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran secara umum, khususnya pada penguatan kompetensi dasar peserta didik.

- **Skor Literasi dan Numerasi SD**
Literasi SD mencapai 115% dan Numerasi SD mencapai 122%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan efektivitas intervensi pembelajaran di jenjang SD.
- **Skor Literasi dan Numerasi SMP**
Literasi SMP mencapai 93% dan Numerasi SMP mencapai 98%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di jenjang SMP masih memerlukan perhatian khusus, terutama pada penguatan literasi membaca.
- **Persentase Capaian SPM Pendidikan**
Capaian sebesar **100%** menunjukkan bahwa layanan dasar pendidikan sesuai kewenangan daerah telah terpenuhi sesuai standar minimal yang ditetapkan.
- **Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) yang Kembali Bersekolah**
Capaian hanya **67%**, menjadi indikator dengan kinerja rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan ekonomi, sosial, serta keterbatasan layanan pendidikan alternatif dan pendampingan ATS.
- **Persentase Pemuda yang Aktif dan Berperan dalam Pembangunan Daerah**
Capaian sebesar 96% menunjukkan keterlibatan pemuda relatif baik, meskipun masih diperlukan perluasan ruang partisipasi dan penguatan peran strategis pemuda.
- **Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**
Capaian 100% menunjukkan program pemberdayaan ekonomi pemuda telah berjalan sesuai target, meskipun skalanya masih terbatas.
- **Rasio Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Kabupaten**
Capaian mencapai 911%, jauh melampaui target. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan peningkatan partisipasi atlet berprestasi di tingkat kabupaten.
- **Jumlah Medali Tingkat Provinsi**
Perolehan 103 medali atau 103% dari target menunjukkan peningkatan prestasi olahraga daerah
- **Nilai SAKIP OPD**
Pada tahun 2025, indikator ini belum dapat dinilai karena hasil evaluasi belum tersedia.

Secara umum, kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 menunjukkan hasil baik hingga sangat baik, khususnya pada indikator pendidikan dasar, literasi, numerasi, dan prestasi olahraga. Namun demikian, indikator ATS yang kembali bersekolah serta literasi dan numerasi SMP masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih fokus dan kolaboratif.

Tabel 2.5
Target Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan		%	19,22	23,32	27,42	31,52	35,62	39,72	43,82
3.	Iklm Inklusivitas SD		Nilai	58,35	60,85	63,35	65,85	68,35	70,85	73,35
4.	Iklm Inklusivitas SMP		Nilai	56,26	58,66	61,06	63,46	65,86	68,26	70,66
5.	Iklm Keamanan SD		Nilai	76,39	77,29	78,19	79,09	79,99	80,89	81,79
6.	Iklm Keamanan SMP		Nilai	68,96	70,46	71,96	73,46	74,96	76,46	77,96
7.	Iklm Kebhinekaan SD		Nilai	68,78	69,78	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78
8.	Iklm Kebinekaan SMP		Nilai	69,15	70,15	71,15	72,15	73,15	74,15	75,15
9.	Indeks Distribusi Guru PAUD		Indeks	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45
10.	Indeks Distribusi Guru SD		Indeks	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48
11.	Indeks Distribusi Guru SMP		Indeks	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,56	0,58
12.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		%	45,21	46,04	47,12	48,33	50,08	57,72	65,37
13.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun		%	76,11	79,15	82,19	85,16	88,13	91,1	93,65
14.	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
15.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun		%	99,29	99,58	99,87	100	100	100	100
16.	Persentase Satuan pendidikan yang mempunyai guru muatan lokal		%	57,57	59	61	63	65	67	69
17.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal		Persentase	100	100	100	100	100	100	100
18.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV		%	71,9	73,42	74,17	74,92	75,67	76,42	73,42
19.	Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG		%	42,64	42,66	42,68	42,7	42,72	42,74	42,76
20.	Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD		%	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	0,32	0,34
21.	Proporsi PTK SMP bersertifikat		%	25,98	26	26,02	26,04	26,06	26,08	26,1
22.	Proporsi PTK SD bersertifikat		%	26,18	26,2	26,22	26,24	26,26	26,28	26,3
23.	Persentase Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Pendidikan	positif	%	-	80	81	82	83	84	85

24.	Persentase Satuan Pendidikan Negeri yang memiliki sarpras dengan kondisi layak	positif	%	-	81	82	83	84	85	86
25.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
26.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		Persentase	-	10	20	30	40	50	60
27.	Rasio Wirausaha Pemuda		Persentase	-	10	20	30	40	50	60

Tabel.2.6
Capaian Indikator 2025 terhadap Target Kinerja Kunci Akhir

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap target Akhir
			Tahun 2025	Tahun 2025		
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan	%	23,32	19,22	43,82	44%
3.	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	60,85	58,35	73,35	80%
4.	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	58,66	56,25	70,66	80%
5.	Iklim Keamanan SD	Nilai	77,29	76,39	81,79	93%
6.	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,46	68,95	77,96	88%
7.	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	69,78	62,78	74,78	84%
8.	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	70,15	69,15	75,15	92%
9.	Indeks Distribusi Guru PAUD	Indeks	0,35	0,41	0,45	91%
10.	Indeks Distribusi Guru SD	Indeks	0,38	0,9	0,48	188%
11.	Indeks Distribusi Guru SMP	Indeks	0,48	0,52	0,58	90%
12.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	46,04	45,21	65,37	69%
13.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	%	79,15	76,11	93,65	81%
14.	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	100	100	100	100%
15.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	%	99,58	99,29	100	99%
16.	Persentase Satuan pendidikan yang mempunyai guru muatan lokal	%	59	59	69	86%
17.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100	100	100	100%
18.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	73,42	68,23	73,42	93%
19.	Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	%	42,66	41,5	42,76	97%
20.	Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	%	0,24	0,23	0,34	68%
21.	Proporsi PTK SMP bersertifikat	%	26	37,6	26,1	144%

22.	Proporsi PTK SD bersertifikat	%	26,2	43,89	26,3	167%
23.	Persentase Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Pendidikan	%	80	71,54	85	84%
24.	Persentase Satuan Pendidikan Negeri yang memiliki sarpras dengan kondisi layak	%	81	84	86	98%
25.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
26.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	10	13	60	22%
27.	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	10	65,35	60	109%

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

• Akses dan Partisipasi Pendidikan

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–18 Tahun Kesetaraan pada Tahun 2025 sebesar 19,22% dari target 23,32%, dengan capaian terhadap target akhir Renstra 2030 sebesar 44%. Capaian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan kesetaraan masih memerlukan upaya percepatan melalui penguatan layanan pendidikan nonformal dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, APS 5–6 Tahun terealisasi sebesar 76,11% dari target 79,15%, dengan capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 81%. Adapun APS 7–15 Tahun telah mencapai 99,29%, mendekati target maksimal 100%, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan akses pendidikan dasar.

• Mutu Lingkungan dan Iklim Sekolah

Indikator mutu lingkungan sekolah yang mencakup iklim inklusivitas, keamanan, dan kebhinekaan menunjukkan capaian yang relatif baik namun belum optimal.

Capaian Iklim Inklusivitas SD sebesar 58,35 dan SMP sebesar 56,25, masing-masing telah mencapai sekitar 80% dari target akhir Renstra 2030. Selanjutnya, Iklim Keamanan SD mencapai nilai 76,39 dan SMP sebesar 68,95, dengan capaian terhadap target akhir Renstra masing-masing 93% dan 88%.

Adapun Iklim Kebhinekaan SD dan SMP mencapai nilai 62,78 dan 69,15, dengan capaian terhadap target Renstra sebesar 84% dan 92%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter, toleransi, serta

penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi seluruh peserta didik.

- **Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Indikator pemerataan pendidik menunjukkan capaian kinerja yang baik hingga sangat baik. Indeks Distribusi Guru PAUD terealisasi sebesar 0,41 dari target akhir Renstra 0,45, atau mencapai 91 persen, yang menunjukkan pemerataan guru PAUD sudah mendekati kondisi ideal.

Sementara itu, Indeks Distribusi Guru SD mencapai nilai 0,90, melampaui target akhir Renstra 0,48, dengan capaian sebesar 188 persen, serta Indeks Distribusi Guru SMP mencapai 90 persen dari target Renstra. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerataan guru, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

Pada aspek peningkatan kualitas pendidik, Proporsi PTK SD dan SMP Bersertifikat masing-masing mencapai 167 persen dan 144 persen terhadap target akhir Renstra, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sertifikasi pendidik.

Namun demikian, Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD baru mencapai 68 persen terhadap target akhir Renstra, sehingga masih diperlukan peningkatan intensitas dan cakupan pengembangan kompetensi teknis bagi pendidik PAUD.

- **Mutu Layanan Pendidikan dan Sarana Prasarana**

Pada aspek layanan pendidikan, Persentase Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Pendidikan terealisasi sebesar 71,54% dari target 80%, dengan capaian Renstra 84%.

Sementara itu, Persentase Satuan Pendidikan Negeri yang memiliki sarana dan prasarana dengan kondisi layak mencapai 84%, setara dengan 98% capaian terhadap target akhir Renstra, yang menunjukkan kondisi infrastruktur pendidikan relatif memadai.

Adapun Peningkatan Proporsi Satuan PAUD dengan Akreditasi minimal B mencapai 69% dari target Renstra, sehingga masih memerlukan upaya percepatan peningkatan mutu kelembagaan PAUD.

- **Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**

Terealisasi sebesar 13% dari target 10%, dengan capaian terhadap target akhir Renstra 2030 sebesar 22%. Capaian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pembinaan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.

- **Rasio Wirausaha Pemuda**

Menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 65,35% dari target 10%, dan capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 109%. Hal ini mencerminkan efektivitas program pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025 menunjukkan hasil positif, khususnya pada indikator pemerataan guru, sertifikasi pendidik, akses pendidikan dasar, serta pemberdayaan kewirausahaan pemuda. Namun demikian, masih diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan: Akses pendidikan kesetaraan dan PAUD; Iklim inklusivitas, keamanan, dan kebhinekaan di satuan pendidikan; Mutu kelembagaan dan kompetensi pendidik PAUD; Pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional.

Upaya percepatan pada indikator-indikator tersebut menjadi fokus perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya guna mendukung pencapaian target akhir Renstra.

2.4 Penjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah 2025

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Eselon II secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP OPD	71,55	71,50
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	60,10	60,10
		Skor Literasi Membaca SMP	62,70	62,70
		Skor Numerasi SD	54,69	54,69
		Skor Numerasi SMP	59,53	59,53
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	72,22	72,23
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	28,77	28,77
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,66	0,66
4.	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	100	100

Sasaran Strategis ini di dukung oleh Program:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 982.457.096.962	Rp. 946.071.071.947
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 303.158.142.824	Rp. 296.859.220.000
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 563.264.500	Rp. 563.084.500
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 300.000.000	Rp. 491.620.000
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 4.584.206.000	Rp. 4.492.586.000

JUMLAH	Rp. 1.291.062.710.286	Rp. 1.248.477.582
---------------	-----------------------	-------------------

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Eselon III secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Sasaran Program, Indikator dan Target Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Kepuasan Perangkat Daerah Terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang berkelanjutan	1	1
		IKM Perangkat Daerah	83,4	83,4
2.	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	99,58	99,58
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	79,15	79,15
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan	23,32	23,32
		Iklm Inklusivitas SD	60,85	60,85
		Iklm Kebhinekaan SD	69,78	69,78
		Iklm Keamanan SD	77,29	77,29
		Iklm Inklusivitas SMP	58,66	58,66
		Iklm Kebhinekaan SMP	70,15	70,15
		Iklm Keamanan SMP	70,46	70,46
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	46,04	46,04
3.		Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	0,24	0,24

	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru SMP	0,48	0,48
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	73,42	73,42
		Indeks Distribusi Guru SD	0,38	0,38
		Indeks Distribusi Guru PAUD	0,35	0,35
		Proporsi PTK SD bersertifikat	26,2	26,2
		Proporsi PTK SMP bersertifikat	26	26
		Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	42,66	42,66
4.	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	10	10
5.	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	10	10

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 (sasaran 2021- 2026)

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran Strategis 2021-2026									
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,4	71,4	100,00%	71,5	71,4	99,86%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 71,5, capaian kinerja belum dapat dilaporkan karena hasil penilaian belum tersedia pada saat penyusunan laporan. Nilai SAKIP akan dilaporkan dan dievaluasi lebih lanjut setelah hasil resmi diterbitkan oleh instansi berwenang.							
2	Meningkatnya pemerataan akses layanan Dikdas, PAUD dan PNF	Angka Rata - rata Lama Sekolah (RLS)	Persen	7,86	7,16	91,09%	7,37	7,5	101,76%

Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 2 (dua) Meningkatnya pemerataan akses layanan Dikdas, PAUD dan PNF dengan target kinerja 7,37, diketahui capaian kinerjanya sebesar 101,76% atau mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah adanya Pemerataan satuan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, PKBM), adanya Program bantuan pendidikan (PIP, KIP, BOS, beasiswa daerah), dan Lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak.							
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	82,48	97,04%	83,4	82,26	98,63%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan target kinerja 83,4, diketahui capaian kinerjanya sebesar 98,63% atau belum mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi penghambat tercapainya target kinerja tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) belum tersosialisasi dengan baik serta Pengawasan dan monitoring pelayanan belum optimal.							

3.2 Realisasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 (sasaran 2025- 2029)

Pada awal tahun anggaran 2025 telah ditetapkan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Dalam penetapan kinerja tersebut dituliskan target-target yang akan dilaksanakan dan dicapai ditahun 2025. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam bidang Pendidikan mempunyai kewajiban mencapai target-target tersebut sesuai dengan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan serta melaporkan atas penggunaan anggaran negara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang untuk mempertanggungjawabkan tingkat ketercapaian (keberhasilan atau kegagalan) dalam pelaksanaan Target Kinerja dengan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai bahan Evaluasi Kinerja melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik. Yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut

antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau Kinerja melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik. Yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Dibawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Selain menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, dalam bab ini juga disajikan informasi kinerja bidang pendidikan lainnya yang telah dicapai selama tahun 2025 yang telah dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan kepada *stakeholders*.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran Strategis 2025-2029									
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,4	71,4	100,00%	71,5	71,4	99,86%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 71,5, capaian kinerja belum dapat dilaporkan karena hasil penilaian belum tersedia pada saat penyusunan laporan. Nilai SAKIP akan dilaporkan dan dievaluasi lebih lanjut setelah hasil resmi diterbitkan oleh instansi berwenang.							

2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	Nilai	-	-	-	60,1	68,92	114,68%
		Skor Literasi Membaca SMP	Nilai	-	-	-	62,7	58,46	93,24%
		Skor Numerasi SD	Nilai	-	-	-	54,69	66,89	122,31%
		Skor Numerasi SMP	Nilai	-	-	-	59,53	58,39	98,08%
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	-	-	-	72,23	72,23	100,00%
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	Persentase	-	-	-	28,77	19,25	66,92%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		<p>Pada Sasaran Strategis 2 (dua) Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan, pada indikator Skor Literasi Membaca SD dengan target kinerja 60,1, diketahui capaian kinerjanya sebesar 114,68% atau mencapai target kinerja, dan pada indikator Skor Numerasi SD dengan target kinerja 54,69, diketahui capaian kinerjanya sebesar 122,31% adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah optimalnya penguatan strategi pembelajaran dan pendampingan akademik di jenjang SD.</p> <p>Sedangkan pada indikator Skor Literasi Membaca SMP dengan target kinerja 62,7, diketahui capaian kinerjanya sebesar 93,24% atau belum mencapai target kinerja, dan pada indikator Skor Numerasi SMP dengan target kinerja 59,63, diketahui capaian kinerjanya sebesar 98,08% adapun faktor yang menjadi penghambat tercapainya target kinerja tersebut adalah masih belum optimalnya penguatan strategi pembelajaran dan pendampingan akademik di jenjang SMP.</p> <p>Kemudian pada indikator Persentase Capaian SPM Pendidikan dengan target kinerja 72,23, diketahui capaian kinerjanya sebesar 100,00% atau mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah adanya pendampingan dan pengawasan pemenuhan SPM.</p> <p>Selanjutnya pada indikator Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah dengan target kinerja 28,77, diketahui capaian kinerjanya sebesar 66,92% atau belum mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi penghambat tercapainya target kinerja tersebut adalah dan pola asuh yang belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas.</p>							

3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	-	-	-	0,66	0,66	100,27%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi dengan target kinerja 0,66, diketahui capaian kinerjanya sebesar 100,27% atau mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah adanya program pelatihan kewirausahaan pemuda, fasilitasi lomba usaha dan inkubasi bisnis, pendampingan usaha pemuda.							
4	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	Angka	-	-	-	100	103	103,00%
Faktor pendukung/penghambat Capaian 2025		Pada Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatkan Prestasi Keolahragaan dengan target kinerja 100, diketahui capaian kinerjanya sebesar 103,00% atau mencapai target kinerja, adapun faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah optimalisasi program pembinaan atlet, dukungan pelatih dan tenaga keolahragaan, serta partisipasi aktif dalam berbagai kejuaraan tingkat provinsi.							

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memiliki Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. Adapun perbandingan target dan realisasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	
			TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP OPD	71,5	71,4
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	60,1	68,92
		Skor Literasi Membaca SMP	62,7	58,46
		Skor Numerasi SD	54,69	66,89
		Skor Numerasi SMP	59,53	58,39
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	72,23	72,23
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	28,77	41,65
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,66	0,66
4.	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	100	103

Berdasarkan Tabel diatas ada beberapa realisasi yang mencapai target atau melebihi target dan ada beberapa realisasi yang belum mencapai target. Untuk penjelasan per indicator ada pada table berikut:

Tabel 3.3
Capaian Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,50	71,40	99,86%

Untuk indikator Nilai SAKIP OPD, capaian kinerja belum dapat dilaporkan karena hasil penilaian belum tersedia pada saat penyusunan laporan. Nilai SAKIP akan dilaporkan dan dievaluasi lebih lanjut setelah hasil resmi diterbitkan oleh instansi berwenang.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
				Target	Realisasi	
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	Nilai	60,1	68,92	114,68%
		Skor Literasi Membaca SMP	Nilai	62,7	58,46	93,24%
		Skor Numerasi SD	Nilai	54,69	66,89	122,31%
		Skor Numerasi SMP	Nilai	59,53	58,39	98,08%
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	72,23	72,23	100,00%
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	Persentase	28,77	41,65	144,78%

Pada aspek kualitas pembelajaran, capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan sebagian indikator telah melampaui target, sementara beberapa indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Literasi Membaca SD dan SMP adalah kemampuan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk memahami, menggunakan,

mengevaluasi, dan merefleksikan teks agar dapat belajar dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Skor Literasi Membaca SD dan SMP biasanya merujuk pada hasil penilaian kemampuan membaca siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dari AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) di Indonesia. Sedangkan Numerasi SD dan SMP adalah kemampuan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk menggunakan konsep dan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berhitung.

Skor Literasi Membaca SD mencapai nilai 68,92 dari target 60,1 atau sebesar 114,68%, sedangkan Skor Numerasi SD mencapai 66,89 dari target 54,69 atau sebesar 122,31%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan mutu pembelajaran dasar, termasuk penguatan literasi dan numerasi di sekolah dasar.

Namun demikian, pada jenjang sekolah menengah pertama, capaian indikator belum sepenuhnya memenuhi target. Skor Literasi Membaca SMP mencapai 58,46 dari target 62,7 atau sebesar 93,24%, dan Skor Numerasi SMP mencapai 58,39 dari target 59,53 atau sebesar 98,08%. Hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan strategi pembelajaran dan pendampingan akademik di jenjang SMP.

Pada aspek akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan, Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan telah mencapai 100%, menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan dasar telah memenuhi ketentuan standar minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. SPM Pendidikan adalah Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan adil.

Sementara itu, indikator Persentase Anak Tidak Sekolah yang Kembali Bersekolah baru mencapai 41,65% dari target 28,77% atau sebesar 144,78%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan anak tidak sekolah sudah cukup optimal.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
				Target	Realisasi	
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	0,66	0,66	100,27%

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri adalah persentase pemuda yang terlibat aktif dalam usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan secara mandiri, baik perorangan maupun kelompok. Untuk Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada Tahun 2025 mencapai 100,27%. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya program pelatihan kewirausahaan pemuda, fasilitasi lomba usaha dan inkubasi bisnis, pendampingan usaha pemuda. Untuk faktor penghambatnya diantaranya data pemuda usaha belum terintegrasi penuh.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
				Target	Realisasi	
4.	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	Nilai	100	103	103,00%

Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi adalah capaian prestasi berupa perolehan medali (emas, perak, atau perunggu) dalam ajang kompetisi resmi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya pada level provinsi. Untuk Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi pada Tahun 2025 mencapai 103%. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain optimalisasi program pembinaan atlet, dukungan pelatih dan tenaga keolahragaan, serta partisipasi aktif dalam berbagai kejuaraan tingkat provinsi. Ke depan, upaya peningkatan prestasi keolahragaan akan terus diarahkan pada penguatan pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatihan, serta optimalisasi sarana dan prasarana olahraga guna menjaga dan meningkatkan capaian prestasi yang berkelanjutan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Berdasarkan Sasaran Program

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2025	
			TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kepuasan Perangkat Daerah Terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang berkelanjutan	1	1
		IKM Perangkat Daerah	83,4	82,26
2.	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	99,58	99,29
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	79,15	76,11
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan	23,32	19,22
		Iklm Inklusivitas SD	60,85	58,35
		Iklm Kebhinekaan SD	69,78	62,78
		Iklm Keamanan SD	77,29	76,39
		Iklm Inklusivitas SMP	58,66	56,25
		Iklm Kebhinekaan SMP	70,15	69,15
		Iklm Keamanan SMP	70,46	68,95
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	46,04	45,21	
3.	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	0,24	0,23
		Indeks Distribusi Guru SMP	0,48	0,52
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	73,42	68,23
		Indeks Distribusi Guru SD	0,38	0,9
		Indeks Distribusi Guru PAUD	0,35	0,41
		Proporsi PTK SD bersertifikat	26,2	43,89

		Proporsi PTK SMP bersertifikat	26	37,6
		Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	42,66	41,5
4.	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	10	65
5.	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	10	13

- Sasaran: Meningkatkan Kepuasan Perangkat Daerah terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian sasaran ini menunjukkan hasil yang cukup baik.

Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Berkelanjutan telah mencapai target, yaitu 1 inovasi dari target 1 inovasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah dalam mendorong inovasi pelayanan secara berkelanjutan.

Namun demikian, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah baru mencapai 82,26 dari target 83,4, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target. Kondisi ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan kualitas layanan penunjang, terutama pada aspek kecepatan layanan, kejelasan prosedur, dan responsivitas terhadap kebutuhan perangkat daerah.

- Sasaran: Meningkatkan Partisipasi Anak Usia Sekolah

Capaian sasaran ini secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum optimal, khususnya pada kelompok usia tertentu dan pendidikan nonformal.

APS 7–15 Tahun mencapai 99,29% dari target 99,58%, relatif mendekati target dan menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan dasar yang tinggi.

APS 5–6 Tahun baru mencapai 76,11% dari target 79,15%, mengindikasikan masih terdapat anak usia PAUD yang belum terlayani pendidikan secara optimal.

APS 7–18 Tahun Kesetaraan mencapai 19,22% dari target 23,32%, menunjukkan rendahnya partisipasi pendidikan kesetaraan bagi anak usia sekolah yang tidak terakomodasi dalam jalur formal.

Pada indikator lingkungan belajar:

Iklim Inklusivitas, Kebhinekaan, dan Keamanan baik di SD maupun SMP secara umum belum mencapai target, meskipun selisih capaian relatif kecil.

Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B mencapai 45,21% dari target 46,04%, menunjukkan perlunya percepatan peningkatan mutu lembaga PAUD.

Secara keseluruhan, sasaran ini memerlukan penguatan intervensi akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya pada PAUD, pendidikan kesetaraan, serta penciptaan iklim sekolah yang inklusif dan aman.

- Sasaran: Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian kinerja sasaran ini menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan beberapa indikator melampaui target dan sebagian lainnya belum tercapai.

Distribusi Guru menunjukkan hasil positif, ditandai dengan: Indeks Distribusi Guru SMP (0,52 dari target 0,48), Indeks Distribusi Guru SD (0,90 dari target 0,38), Indeks Distribusi Guru PAUD (0,41 dari target 0,35). Proporsi PTK Bersertifikat menunjukkan peningkatan signifikan: PTK SD bersertifikat mencapai 43,89% dari target 26,2%, PTK SMP bersertifikat mencapai 37,6% dari target 26%.

Namun demikian, Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD (0,23 dari target 0,24), Proporsi Guru PAUD Berkualifikasi S1/D IV (68,23% dari target 73,42%), Proporsi PTK Bersertifikat melalui PPG (41,5% dari target 42,66%) belum sepenuhnya mencapai target, yang menunjukkan perlunya penguatan program peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik, khususnya pada jenjang PAUD.

- Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan

Sasaran ini menunjukkan capaian sangat baik.

Indikator Rasio Wirausaha Pemuda mencapai 65 dari target 10, yang berarti jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi pemuda, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan terhadap pengembangan usaha produktif pemuda.

- Sasaran: Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga

Capaian sasaran ini menunjukkan hasil baik.

Indikator Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas mencapai 13% dari target 10%, menandakan meningkatnya kualitas pembinaan dan prestasi atlet daerah di tingkat nasional.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Realisasi 2024
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,5	71,4	71,4

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mendapat nilai SAKIP sebesar 71,4. Sedangkan untuk realisasi nilai SAKIP OPD untuk 2025 masih kosong, karena belum dilakukannya reuiu SAKIP.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Realisasi 2024
				Target	Realisasi	
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	Nilai	60,1	68,92	57,6
		Skor Literasi Membaca SMP	Nilai	62,7	58,46	61,6
		Skor Numerasi SD	Nilai	54,69	66,89	51,79
		Skor Numerasi SMP	Nilai	59,53	58,39	58,03
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	72,23	72,23	65,15
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	Persentase	28,77	41,65	28,57

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2024, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pada aspek kualitas pembelajaran, seluruh indikator literasi dan numerasi menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam:

Skor Literasi Membaca SD meningkat dari 57,60 pada Tahun 2024 menjadi 68,92 pada Tahun 2025, dan telah melampaui target 60,1. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan pembelajaran literasi di jenjang pendidikan dasar. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan intervensi pembelajaran literasi di jenjang sekolah dasar.

Skor Numerasi SD juga mengalami peningkatan signifikan dari 51,79 pada Tahun 2024 menjadi 66,89 pada Tahun 2025, jauh melampaui target 54,69, yang mencerminkan efektivitas intervensi numerasi dasar. Implementasi program penguatan literasi dan numerasi secara terstruktur di jenjang SD, termasuk pemanfaatan hasil asesmen dan pendampingan

pembelajaran, menjadi faktor utama meningkatnya capaian Skor Literasi dan Numerasi SD yang melampaui target pada Tahun 2025.

Skor Literasi Membaca SMP mengalami penurunan dari 61,60 pada Tahun 2024 menjadi 58,46 pada Tahun 2025, dan belum mencapai target 62,7. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pembelajaran literasi di jenjang SMP. Untuk Skor Numerasi SMP relatif stabil, meningkat tipis dari 58,03 pada Tahun 2024 menjadi 58,39 pada Tahun 2025, namun masih belum mencapai target 59,53. Adapun factor penghambatnya diantaranya adanya variasi kompetensi pendidik, adaptasi peserta didik terhadap materi yang lebih kompleks, serta keterbatasan pendampingan pembelajaran di jenjang tersebut.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pembelajaran di jenjang SMP telah memberikan hasil positif, namun masih memerlukan penguatan agar target dapat tercapai sepenuhnya.

Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan meningkat dari 65,15% pada Tahun 2024 menjadi 72,23% pada Tahun 2025, dan telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dasar sesuai standar minimal.

Sementara itu, Persentase Anak Tidak Sekolah yang Kembali Bersekolah mengalami penurunan dari 28,57% pada Tahun 2024 menjadi 41,65% pada Tahun 2025, dan sudah melebihi target 28,77%.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Realisasi 2024
				Target	Realisasi	
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	0,66	0,66	0,66

Capaian indikator telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan menunjukkan stabilitas partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Namun, belum terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,

sehingga perlu penguatan intervensi program agar terjadi pertumbuhan partisipasi.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2025		Realisasi 2024
				Target	Realisasi	
4.	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	Nilai	100	103	105

Upaya peningkatan prestasi keolahragaan pada tahun 2025 diukur melalui indikator Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator tersebut pada tahun 2025 mencapai 103 medali, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100 medali. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja peningkatan prestasi keolahragaan berada pada kategori sangat baik, serta mencerminkan keberhasilan pembinaan atlet dan cabang olahraga yang dilakukan secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 105 medali, realisasi tahun 2025 relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan. Namun demikian, capaian tersebut tetap berada di atas target yang ditetapkan dan menunjukkan konsistensi prestasi olahraga daerah minimal di tingkat provinsi.

3. Capaian Kinerja Tahun ini dengan Akhir Periode

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Tahun ini dengan Akhir Periode

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026/ Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis 2021-2026						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,6	71,4	99,72%

2	Meningkatnya pemerataan akses layanan Dikdas, PAUD dan PNF	Angka Rata - rata Lama Sekolah (RLS)	Persen	7,45	7,5	100,67%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	82,26	96,77%
Sasaran Strategis 2025-2029						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,90	71,4	99,30%
2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	Nilai	70,10	68,92	98,32%
		Skor Literasi Membaca SMP	Nilai	67,10	58,46	87,12%
		Skor Numerasi SD	Nilai	66,29	66,89	100,91%
		Skor Numerasi SMP	Nilai	65,53	58,39	89,10%
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	78	72,23	92,60%
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	Persentase	29,57	19,25	65,11%
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	0,78	0,66	84,85%
4	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	Angka	150	103	68,67%

- Sasaran Strategis 2021–2026

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Nilai SAKIP mencapai 99,72% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja

perangkat daerah telah berjalan dengan baik dan relatif konsisten, meskipun masih terdapat sedikit gap terhadap target yang ditetapkan.

2) Meningkatnya Pemerataan Akses Layanan Dikdas, PAUD, dan PNF

Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 100,67%, melampaui target. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program perluasan akses pendidikan dasar dan nonformal serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 96,77% dari target. Capaian ini menunjukkan kualitas pelayanan publik sudah baik, namun masih perlu peningkatan pada aspek kecepatan, kemudahan, dan konsistensi layanan.

- Sasaran Strategis 2025–2029

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP mencapai 99,30% dari target. Capaian ini menunjukkan kesinambungan kinerja akuntabilitas dari periode sebelumnya, meskipun masih diperlukan penguatan inovasi dan kualitas outcome kinerja.

2) Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Literasi dan Numerasi SD menunjukkan kinerja relatif baik, dengan numerasi SD bahkan melampaui target (100,91%).

Literasi dan Numerasi SMP masih berada di bawah target, dengan capaian masing-masing 87,12% dan 89,10%, menunjukkan adanya tantangan pada kualitas pembelajaran di jenjang SMP.

Persentase Capaian SPM Pendidikan mencapai 92,60%, menandakan sebagian besar layanan dasar pendidikan telah terpenuhi namun belum sepenuhnya optimal.

Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) yang Kembali Bersekolah masih rendah (65,11%), menjadi indikator dengan capaian terendah pada sasaran ini dan memerlukan intervensi lintas sektor yang lebih intensif.

3) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kemandirian Ekonomi

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai 84,85%. Capaian ini menunjukkan program pemberdayaan pemuda sudah berjalan,

namun masih diperlukan penguatan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha.

4) Meningkatkan Prestasi Keolahragaan

Jumlah perolehan medali baru mencapai 68,67% dari target. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pembinaan atlet, sarana prasarana olahraga, serta intensifikasi keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat provinsi.

Secara umum, kinerja sasaran strategis menunjukkan hasil positif, khususnya pada aspek akuntabilitas dan akses pendidikan. Namun demikian, beberapa indikator utama masih memerlukan perhatian serius, terutama literasi dan numerasi SMP, pemenuhan SPM Pendidikan, pengembalian ATS ke sekolah, partisipasi ekonomi pemuda, dan prestasi keolahragaan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional

Berikut adalah realisasi daerah dan realisasi nasional:

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Capaian Nasional	Selisih	Keterangan
1	Skor Literasi Membaca SD	68,92	71,81	-2,89	Dibawah Nasional
2	Skor Literasi Membaca SMP	58,46	72,01	-13,55	Dibawah Nasional
3	Skor Numerasi SD	66,89	69,58	-2,69	Dibawah Nasional
4	Skor Numerasi SMP	58,39	69,61	-11,22	Dibawah Nasional
5	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	45,21	62,71	-17,5	Dibawah Nasional
6	Iklim Keamanan SD	76,39	74,92	+1,47	Diatas Nasional
7	Iklim Keamanan SMP	68,95	69,7	-0,75	Dibawah Nasional
8	Iklim Kebhinekaan SD	62,78	71,55	-8,77	Dibawah Nasional

9	Iklm Kebhinekaan SMP	69,15	70,29	-1,14	Dibawah Nasional
10	Iklm Inklusivitas SD	58,35	58,9	-0,55	Dibawah Nasional
11	Iklm Inklusivitas SMP	56,25	57,26	-1,01	Dibawah Nasional
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	76,11	74,15	+1,96	Diatas Nasional
13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	99,29	98,22	+1,07	Diatas Nasional
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan	19,22	24,81	-5,59	Dibawah Nasional

Sumber: Rapor Pendidikan

Keterangan:

Selisih (+) : Realisasi daerah lebih tinggi dari Realisasi Nasional

Selisih (-) : Realisasi daerah lebih rendah dari Realisasi Nasional

Secara umum, capaian kinerja pendidikan daerah pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berada di bawah capaian nasional, khususnya pada aspek literasi, numerasi, mutu PAUD, serta iklim kebhinekaan dan inklusivitas. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang telah melampaui capaian nasional, terutama pada aspek partisipasi sekolah dan iklim keamanan.

Pada indikator literasi membaca dan numerasi, baik pada jenjang SD maupun SMP, capaian daerah masih tertinggal dari realisasi nasional dengan kesenjangan yang cukup signifikan, terutama pada literasi dan numerasi SMP. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran dan penguatan kompetensi dasar pada jenjang menengah pertama masih memerlukan perhatian khusus dan intervensi yang lebih terarah.

Kesenjangan paling besar terhadap nasional terdapat pada indikator proporsi satuan PAUD yang terakreditasi minimal B. Capaian daerah yang masih jauh di bawah nasional mengindikasikan perlunya percepatan peningkatan mutu layanan PAUD melalui pendampingan akreditasi, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemenuhan standar sarana prasarana.

Pada indikator iklim sekolah, capaian iklim keamanan SD telah melampaui realisasi nasional dan menjadi salah satu kekuatan daerah yang perlu dipertahankan. Namun demikian, indikator iklim keamanan SMP, kebhinekaan, dan inklusivitas pada SD dan SMP masih berada sedikit di bawah nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun serta 7–15 tahun telah melampaui capaian nasional, yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga akses dan partisipasi pendidikan dasar. Sebaliknya, APS pendidikan kesetaraan usia 7–18 tahun masih tertinggal cukup jauh dari nasional, sehingga memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jalur pendidikan nonformal dan kesetaraan.

Secara keseluruhan, fokus peningkatan kinerja daerah ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran (literasi dan numerasi), percepatan peningkatan mutu PAUD, serta penguatan iklim kebhinekaan dan inklusivitas, dengan tetap mempertahankan capaian positif pada akses pendidikan dan keamanan sekolah.

3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Persasaran
				Awal	Perubahan			
Sasaran Strategis 2021-2026								
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp982.457.096.962	Rp946.071.071.947	Rp623.863.131.636	65,94%	65,94%
2	Meningkatnya pemerataan akses layanan Dikdas, PAUD dan PNF	Angka Rata - rata Lama Sekolah (RLS)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp303.158.142.824	Rp296.859.220.000	Rp 96.161.433.747	32,39%	65,65%
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 563.264.500	Rp 563.084.500	Rp 556.934.500	98,91%	

3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 300.000.000	Rp 491.620.000	Rp 491.620.000	100,00%	99,67%
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 4.584.206.000	Rp 4.492.586.000	Rp 4.463.016.689	99,34%	
Sasaran Strategis 2025-2029								
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp982.457.096.962	Rp946.071.071.947	Rp623.863.131.636	65,94%	65,94%
2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp303.158.142.824	Rp296.859.220.000	Rp 96.161.433.747	32,39%	59,85%
		Skor Literasi Membaca SMP						
		Skor Numerasi SD						

		Skor Numerasi SMP	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 563.264.500	Rp 563.084.500	Rp 556.934.500	87,31%	
		Persentase Capaian SPM Pendidikan						
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah						
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 300.000.000	Rp 491.620.000	Rp 491.620.000	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 4.584.206.000	Rp 4.492.586.000	Rp 4.463.016.689	99,34%	99,34%

Tabel 3.9

Program dan Kegiatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impact/Outcome), Kegiatan (Outcome/Hasil), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja pada Tahun Berjalan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran yang Dievaluasi	
			(3)	(4)	(5)	(6)		(11) = (7) + (8) + (9) + (10)
			K	Rp	K	RP	K	RP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100	1.243.367.976.447	69,10	720.581.499.883	0,69	0,58
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	946.071.071.947	99,89	623.863.131.636	99,89%	65,94%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	82.740.000	100,00	82.740.000	100,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	7.550.000	6,00	7.550.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1,00	5.000.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.400.000	1,00	6.400.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.200.000	1,00	4.200.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.900.000	1,00	4.900.000	100,00%	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	50.050.000	5,00	50.050.000	100,00%	100,00%

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2	4.640.000	2,00	4.640.000	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	941.733.462.447	100,00	619.694.392.728	100,00%	65,80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	14	941.716.862.447	14,00	619.677.792.728	100,00%	65,80%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	3.100.000	4,00	3.100.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	13.500.000	14,00	13.500.000	100,00%	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	22.100.000	100,00	22.100.000	100,00%	100,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	22.100.000	1,00	22.100.000	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	655.245.900	99,35	621.327.819	99,35%	94,82%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18.860.000	12,00	18.860.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	301.195.900	1,00	294.360.198	100,00%	97,73%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.295.000	1,00	19.295.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	238.845.000	2,00	222.046.121	100,00%	92,97%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.600.000	2,00	22.500.000	100,00%	99,56%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	30.000.000	12,00	19.816.500	100,00%	66,06%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	24.450.000	1,00	24.450.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.209.623.600	100,00	3.100.834.589	100,00%	96,61%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	196.400.000	12,00	196.400.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	446.000.000	12,00	404.002.589	100,00%	90,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.567.223.600	12,00	2.500.432.000	100,00%	97,40%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	367.900.000	100,00	341.736.500	100,00%	92,89%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	93.000.000	4,00	68.022.000	100,00%	73,14%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	40.000.000	4,00	39.570.000	100,00%	98,93%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	234.900.000	1,00	234.144.500	100,00%	99,68%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	100	296.733.820.000	99,81	96.161.433.747	99,81%	32,41%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	%	100	173.659.212.000	99,99	48.444.634.788	100,00%	27,90%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.094.350.000	5,00	950.900.840	100,00%	86,89%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	15	2.219.449.500	13,00	1.962.495.100	86,67%	88,42%

Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	15	3.395.200.000	13,00	3.106.247.860	86,67%	91,49%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	50	8.520.483.412	44,00	7.140.829.980	88,00%	83,81%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	601.699.500	4,00	600.298.900	100,00%	99,77%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	15	2.427.560.000	14,00	2.281.806.900	93,33%	94,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	181	4.872.617.000	181,00	4.849.028.633	100,00%	99,52%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	871	949.650.000	871,00	947.925.000	100,00%	99,82%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	873	121.311.785.000	873,00	-	100,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	873	512.700.000	873,00	510.600.000	100,00%	99,59%
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	60	237.055.000	60,00	233.308.000	100,00%	98,42%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	9	570.650.000	9,00	568.145.300	100,00%	99,56%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	25	9.990.553.295	25,00	9.904.519.800	100,00%	99,14%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	17	1.906.288.000	17,00	1.901.992.600	100,00%	99,77%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	38	13.409.595.293	35,00	11.865.393.220	92,11%	88,48%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	132000	152.320.000	132000,00	152.244.500	100,00%	99,95%

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	12	1.487.256.000	12,00	1.468.898.155	100,00%	98,77%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah pertama	%	100	85.175.285.000	99,82	36.943.646.391	100,00%	43,37%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	669.750.000	3,00	661.517.000	100,00%	98,77%
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	2	976.586.800	2,00	973.873.800	100,00%	99,72%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	12	1.996.850.000	7,00	1.583.487.000	58,33%	79,30%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	128	18.918.546.800	127,00	18.517.104.500	99,22%	97,88%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	687.350.000	3,00	685.855.000	100,00%	99,78%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	539.000.000	1,00	240.461.000	50,00%	44,61%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	21	1.830.432.500	21,00	1.791.067.500	100,00%	97,85%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	250	5.056.250.000	250,00	5.001.700.000	100,00%	98,92%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	663	359.800.000	663,00	358.300.068	100,00%	99,58%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	916	855.000.000	916,00	854.262.494	100,00%	99,91%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	Orang	174	70.000.000	174,00	70.000.000	100,00%	100,00%

	Sekolah Menengah Pertama								
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	174	70.000.000	174,00	70.000.000	100,00%	100,00%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	174	245.000.000	174,00	245.000.000	100,00%	100,00%	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	174	46.757.871.000	174,00	-	100,00%	0,00%	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	672	300.000.000	672,00	300.000.000	100,00%	100,00%	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	672	250.500.000	672,00	250.500.000	100,00%	100,00%	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	115	226.000.000	115,00	204.302.500	100,00%	90,40%	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	174	150.000.000	174,00	150.000.000	100,00%	100,00%	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5	1.317.775.900	4,00	1.099.482.900	80,00%	83,43%	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	3.615.600.000	14,00	3.605.239.500	100,00%	99,71%	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	5	282.972.000	5,00	281.493.129	100,00%	99,48%	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100	23.019.309.000	99,44	6.427.988.668	99,44%	27,92%	

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	13	1.702.239.000	9,00	1.311.898.948	69,23%	77,07%
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Unit	27	408.906.345	27,00	408.906.345	100,00%	100,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	285	176.636.000	285,00	175.313.600	100,00%	99,25%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah PAUD Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	755	15.736.194.000	755,00	-	100,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	135	219.450.000	135,00	219.450.000	100,00%	100,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	66.770.280	2,00	63.992.136	100,00%	95,84%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	7	1.571.715.775	6,00	1.383.148.115	85,71%	88,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	816.187.000	7,00	710.737.000	87,50%	87,08%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	9	1.245.892.600	9,00	1.215.602.524	100,00%	97,57%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	1.075.318.000	6,00	938.940.000	85,71%	87,32%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	100	14.880.014.000	100,00	4.345.163.900	100,00%	29,20%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1143	4.264.300.000	1143,00	4.133.549.900	100,00%	96,93%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Lembaga	46	10.404.100.000	46,00	-	100,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	140	211.614.000	140,00	211.614.000	100,00%	100,00%

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROSENTASE PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	%	100	563.084.500	60,00	556.934.500	60,00%	98,91%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	100	563.084.500	100,00	556.934.500	100,00%	98,91%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	3	408.939.500	3,00	408.289.500	100,00%	99,84%
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	2	154.145.000	2,00	148.645.000	100,00%	96,43%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.984.206.000		4.954.636.689		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		%	100	4.984.206.000	100,00	4.954.636.689	100,00%	99,41%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	%	100	491.620.000	100,00	491.620.000	100,00%	100,00%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prosentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	%	100	491.620.000	100,00	491.620.000	100,00%	100,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	ORANG	60	200.000.000	60,00	200.000.000	100,00%	100,00%

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	ORANG	40	291.620.000	40,00	291.620.000	100,00%	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	%	100	4.492.586.000	100,00	4.463.016.689	100,00%	99,34%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	399.374.082	98,85	385.372.050	98,85%	96,49%
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	87	399.374.082	87,00	385.372.050	100,00%	96,49%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	169.900.000	100,00	169.900.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	169.900.000	2,00	169.900.000	100,00%	100,00%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	%	100	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00%	100,00%
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	orang	46	100.000.000	46,00	100.000.000	100,00%	100,00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%	100	886.215.000	100,00	878.259.005	100,00%	99,10%
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen	2	226.215.000	2,00	218.259.005	100,00%	96,48%
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	660.000.000	3,00	660.000.000	100,00%	100,00%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	100	2.937.096.918	100,00	2.929.485.634	100,00%	99,74%

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	4	2.812.890.918	4,00	2.805.279.634	100,00%	99,73%
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	13	124.206.000	13,00	124.206.000	100,00%	100,00%
Jumlah			142.359	1.248.352.182.447	142.352	725.536.136.572	99,995%	58,12%

Berdasarkan tabel diatas, program/kegiatan yang berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja antara lain:

1. Program Layanan Dasar Perangkat Daerah dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 946.071.071.947,00 terealisasi sebesar Rp. 623.863.131.636,00 yaitu 65,94% dari yang direncanakan, dan menyisakan silpa sebesar Rp. 322.207.940.311,00.
2. Program Pengelolaan Pendidikan, dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 296.733.820.000,00 terealisasi sebesar Rp. 96.161.433.747,00 yaitu 32,41%. yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 23.019.309.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.427.988.668,00 yaitu 27,92% dari yang direncanakan, dan sisa yang belum di serap sebesar Rp. 16.591.320.332,00. Hal ini dikarenakan dana BOP PAUD yang sudah di salurkan ke sekolah belum dilaporkan ke dinas, sehingga belum di catat didalam laporan keuangan dinas, dan adanya paket pekerjaan yang batal paket dikarenakan waktu tidak akan mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan, karena perubahan disahkan diakhir nopember. Yang batal paket diantaranya:

NO.	KEGIATAN	LOKASI	Volume	Satuan	PAGU

1	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					370.000.000
		1	Pembangunan UKS beserta perabotnya TKN NUSA INDAH Kec. Cimanggu	1	Paket	120.000.000
		2	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar RA AL-AZHAR Kp. Kepuh Rt.001 Rw.009 Desa Tanjungjaya Panimbang	1	Paket	60.000.000
		3	Pembangunan Area Bermain Beserta APE TK ASSURAH Kp. Menes Desa Menes	1	Paket	130.000.000
		4	Pembangunan Pemagaran (TK) Insan Dwisatya Kp. Sukamaju Desa Rancapinang Kec. Cimanggu	1	Paket	60.000.000
2	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru					180.000.000
		1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (TK) Al-Salikin Kp. Lebak Sereseh Kadubera Desa Kadubera Kec. Picung	1	Paket	180.000.000
3	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					100.000.000
		1	Rehabilitasi Toilet TKN Harapan Angsana	1	Paket	100.000.000
4	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					130.000.000
		1	Rehab Ruang Kelas RA KARTINI Majasari	1	Paket	130.000.000

2) Kegiatan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 14.880.014.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.345.163.900,00 yaitu 29,70% dari yang direncanakan, dan sisa yang belum di serap sebesar Rp. 10.534.850.100,00. Hal ini dikarenakan dana BOP Nonformal/Kesetaraan yang sudah di salurkan ke sekolah belum dilaporkan ke dinas, sehingga belum di catat didalam laporan keuangan dinas.

3) Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 173.659.212.000,00 terealisasi sebesar Rp. 48.444.634.788,00 yaitu 27,90% dari yang direncanakan, dan sisa yang belum di serap sebesar Rp. 125.214.577.212,00. Hal ini dikarenakan dana BOS Sekolah Dasar yang sudah di salurkan ke sekolah belum dilaporkan ke dinas, sehingga belum di catat didalam laporan keuangan dinas dan adanya paket pekerjaan yang batal paket dikarenakan waktu tidak akan mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan, karena perubahan disahkan diakhir nopember. Yang batal paket diantaranya:

No.	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi Awal	Lokasi Pengganti	Pagu	Pagu Konsolidasi
1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan SDN Kec. Cikeusik	Pembangunan Perpustakaan SDN Tanjungan 5 Kec. Cikeusik	Tetap	205.000.000,00	410.000.000,00
			Pembangunan Perpustakaan SDN Tanjungan 2, Kec. Cikeusik	Pembangunan Perpustakaan SDN Nanggala 4, Kec. Cikeusik	205.000.000,00	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kec. Cikeusik	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Tanjungan 2 Kec. Cikeusik, Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Sukaseneng 2 Kec. Cikeusik, & Pembangunan Toilet beserta Sanitasinya SDN Sukaseneng 2, Kec. Cikeusik	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Tanjungan 2 Kec. Cikeusik	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Cikiruhwetan 3, Kec. Cikeusik	205.000.000,00	548.190.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Sukaseneng 2 Kec. Cikeusik	Tetap	205.000.000	
			Pembangunan Toilet beserta Sanitasinya SDN Sukaseneng 2, Kec. Cikeusik	Tetap	138.190.000	
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar Kec. Mandalawangi	Pembangunan Pemagaran/Paving Block Sekolah SDN Kurungkambang 1 Kec. Mandalawangi (Pemagaran),	Tetap	75.000.000	351.380.000

			Pembangunan Toilet beserta Sanitasinya SDN Cikoneng 2 Kec. Mandalawangi	Pembangunan Toilet beserta Sanitasinya SDN Panjangjaya 1 Kec. Mandalawangi	138.190.000	
			Pembangunan Toilet beserta Sanitasinya SDN Curuglemo 1 Kec. Mandalawangi	Pembangunan Toilet beserta Sanitasinya SDN Kurungkambing 1 Kec. Mandalawangi	138.190.000	
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SDN Kec. Carita	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SDN Carita 2 Kec. Carita,	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SDN Sukanagara 2, Kec. Carita	123.631.000	247.262.000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SDN Sukarame 2 Kec. Carita	Tetap	123.631.000	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN Surianeun 2 Kec. Patia	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN Surianeun 2 Kec. Patia	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN Pasirgadung 2, Kec. Patia	137.354.000	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kec. Sindangresmi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Pasirtenjo 2 Kec. Sindangresmi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Padaherang 2 Kec. Angsana	394.146.000	1.182.438.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Pasirtenjo 1 Kec. Sindangresmi	Tetap	394.146.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Pasirtenjo 4 Kec. Sindangresmi	Tetap	394.146.000	

- 4) Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 85.175.285.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.943.646.391,00 yaitu 43,37% dari yang direncanakan, dan sisa yang belum di serap sebesar Rp. 48.231.638.609,00. Hal ini dikarenakan dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang sudah di salurkan ke sekolah belum dilaporkan ke dinas, sehingga belum di catat didalam laporan keuangan dinas, dan adanya paket pekerjaan yang batal paket dikarenakan waktu

tidak akan mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan, karena perubahan disahkan diakhir nopember. Yang batal Paket diantaranya:

No	Uraian Pekerjaan	Spek	Satuan	Harga	Total
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Mathla'ul Anwar	1	Paket	200.000.000	200.000.000
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 Jiput	1	Paket	270.000.000	270.000.000
3	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 7 Cimanggu	1	Paket	100.000.000	100.000.000
4	Pembangunan TPT dan Pemagaran SMPN 3 Saketi	1	Paket	100.000.000	100.000.000
5	Pembangunan Pavingblock SMPN 5 Cikeusik	1	Paket	75.000.000	75.000.000
6	Pembangunan Pavingblock SMPN 3 Labuan	1	Paket	75.000.000	75.000.000
7	Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 2 Cipeucang	1	Paket	275.000.000	275.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Spek	Satuan	Harga	Total
1	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TPT, Pemagaran dan Pavingblock	1	Paket	30.000.000	30.000.000
2	Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 2 Cipeucang	1	Paket	15.000.000	15.000.000
3	Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 Jiput	1	Paket	15.000.000	15.000.000
4	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Mathla'ul Anwar	1	Paket	10.000.000	10.000.000

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 563.084.500,00 terealisasi sebesar Rp. 556.934.500,00 yaitu 98.91% dari yang direncanakan, dan yang belum terserap sebesar Rp. 6.150.000,00.
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 491.620.000,00 terealisasi sebesar Rp. 491.620.000,00 yaitu 100% dari yang direncanakan.
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dari anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 4.492.586.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.463.016.689,00 yaitu 99.34% dari yang direncanakan, dan yang belum terserap sebesar Rp. 29.569.311,00.

Dari daftar di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tertinggi sampai dengan bulan Desember 2025 adalah pada program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu 100% sedangkan realisasi terendah adalah pada program Pengelolaan Pendidikan yaitu 32.41%. Realisasi serapan anggaran setiap program di tahun 2025 ini sudah cukup baik. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 ini telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai sasaran dan tujuan pendidikan di tahun 2026.

Tabel 3.10
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3) * 100}{100}$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	246.789.000,00	41,13	258.978.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	246.789.000,00	41,13	258.978.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	246.789.000,00	41,13	258.978.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000,00	246.789.000,00	41,13	258.978.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	246.789.000,00	41,13	258.978.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.248.352.182.447,00	952.017.801.145,00	76,26	1.053.715.818.685,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.132.572.560.403,00	853.859.888.516,00	75,39	892.789.519.153,00
5.1.01	Belanja Pegawai	941.716.862.447,00	759.204.973.643,00	80,62	809.744.421.261,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.190.243.956,00	70.877.240.633,00	47,83	74.756.911.892,00
5.1.05	Belanja Hibah	42.665.454.000,00	23.777.674.240,00	55,73	7.973.186.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.132.572.560.403,00	853.859.888.516,00	75,39	892.789.519.153,00
5.2	BELANJA MODAL	115.779.622.044,00	98.157.912.629,00	84,78	160.926.299.532,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.947.363.227,00	17.742.137.172,00	68,38	21.100.966.938,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.873.802.693,00	74.664.544.857,00	93,48	134.665.291.399,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.958.456.124,00	5.751.230.600,00	57,75	5.160.041.195,00

	JUMLAH BELANJA MODAL	115.779.622.044,00	98.157.912.629,00	84,78	160.926.299.532,00
	JUMLAH BELANJA	1.248.352.182.447,00	952.017.801.145,00	76,26	1.053.715.818.685,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.247.752.182.447,00)	(951.771.012.145,00)	76,28	(1.053.456.840.685,00)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun anggaran 2025 pagu anggaran belanja sebesar Rp. 1.248.352.182.447,- terealisasi Rp. 952.017.801.145,- (76,26%).

Persentase realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 sampai dengan bulan Desember adalah 76,26% dari total anggaran yang telah direncanakan di tahun 2025. Adapun komposisi dari realisasi belanja operasi adalah sebesar 75,39% dan persentase serapan belanja modal adalah 84,78%.

Dari persentase capaian operasi dan belanja modal yang mencapai 84,78% menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2025 ini bekerja keras untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia sehingga daya serapan anggaran baik itu belanja operasi maupun belanja modal cukup besar. Ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dan menunjukkan ketepatan perencanaan pendidikan di tahun 2025.

3.4 Analisis Efisiensi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

Tabel 3.11

Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Anggaran	KETERANGAN
Sasaran Strategis 2021-2026						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	99,86%	65,94%	33,92%	Belum Efisien

2	Meningkatnya pemerataan akses layanan Dikdas, PAUD dan PNF	Angka Rata - rata Lama Sekolah (RLS)	101,76%	65,65%	36,11%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,63%	99,67%	-1,04%	Belum Efisien
Sasaran Strategis 2025-2029						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	99,86%	65,94%	33,92%	Belum Efisien
2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	114,68%	59,85%	54,82%	Efisien
		Skor Literasi Membaca SMP	93,24%	59,85%	33,39%	Belum Efisien
		Skor Numerasi SD	122,31%	59,85%	62,46%	Efisien
		Skor Numerasi SMP	98,08%	59,85%	38,23%	Belum Efisien
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100,00%	59,85%	40,15%	Efisien
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	66,92%	59,85%	7,07%	Belum Efisien
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100,27%	84,85%	15,43%	Efisien
4	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	103,00%	68,67%	34,33%	Efisien

- Sasaran Strategis 2021–2026

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai SAKIP) Capaian kinerja sangat tinggi (99,86%), namun tingkat penyerapan anggaran baru mencapai 65,94% sehingga tingkat efisiensi tercatat 33,92% dan dikategorikan *belum efisien*. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan capaian indikator belum sepenuhnya didukung oleh optimalisasi penggunaan anggaran, sehingga masih terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan dan penjadwalan kegiatan.
- 2) Meningkatnya Pemerataan Akses Layanan Dikdas, PAUD, dan PNF (RLS) Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan capaian kinerja melebihi target (101,76%) dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 36,11% dan dikategorikan *efisien*. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal meskipun dengan penyerapan anggaran yang relatif moderat.
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 98,63% dengan penyerapan anggaran 99,67% menghasilkan tingkat efisiensi negatif (-1,04%) dan dikategorikan *belum efisien*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

- Sasaran Strategis 2025–2029

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai SAKIP) Capaian kinerja tetap sangat tinggi (99,86%), namun tingkat efisiensi masih berada pada kategori *belum efisien* (33,92%). Hal ini menunjukkan perlunya penajaman keterkaitan antara alokasi anggaran dan aktivitas yang berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas.
- 2) Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
 - Indikator literasi dan numerasi SD menunjukkan capaian kinerja yang tinggi (di atas 114%) dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik, sehingga dikategorikan *efisien*.

- Sementara itu, indikator literasi dan numerasi SMP serta persentase anak tidak sekolah yang kembali bersekolah masih menunjukkan efisiensi yang rendah dan dikategorikan *belum efisien*. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi program pada jenjang SMP dan penanganan ATS perlu diperkuat agar penggunaan anggaran lebih berdampak terhadap capaian kinerja.

3) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kemandirian Ekonomi
Capaian kinerja mencapai 100,27% dengan tingkat efisiensi 15,43% dan dikategorikan *efisien*. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan pemuda telah berjalan cukup optimal dan efektif dalam mendukung sasaran yang ditetapkan.

4) Meningkatnya Prestasi Keolahragaan
Indikator jumlah medali menunjukkan capaian kinerja 103% dengan tingkat efisiensi anggaran 34,33% dan dikategorikan *efisien*. Hal ini menandakan bahwa dukungan anggaran terhadap pembinaan dan prestasi olahraga telah memberikan hasil yang sepadan.

Secara umum, sebagian besar sasaran strategis telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa indikator dengan tingkat efisiensi anggaran yang *belum optimal*, terutama pada aspek akuntabilitas dan beberapa indikator pendidikan jenjang SMP. Kondisi ini menjadi dasar perlunya penguatan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

3.4 Prestasi yang diraih Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga telah mengikuti beberapa event baik di tingkat OPD maupun di bidang olahraga, diantaranya adalah penilaian ombudsman:

PENILAIAN OMBUDSMAN

Nama OPD	Skor Ombudsman 2023	Skor Ombudsman 2024	Perubahan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pandeglang	86,15	92,23	+6,08

Terjadi peningkatan signifikan skor penilaian Ombudsman sebesar 6,08 poin dari tahun 2023 ke 2024. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan publik, khususnya pada aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas layanan. Skor tahun 2024 yang mencapai 92,23 menempatkan OPD pada kategori kualitas pelayanan tinggi, mencerminkan komitmen organisasi dalam melakukan pembenahan tata kelola dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Adapun perolehan medali yang didapatkan diantaranya:

PEROLEHAN MENDALI

TAHUN 2025

NO	NAMA KEJUARAAN	JUMLAH ATLET YANG IKUT			JUMLAH MEDALI YANG DIPEROLEH				KETERANGAN
		PRIA	WANITA	TOTAL	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL	
1	O2SN SLTP Tingkat Provinsi	1	1	2	0	0	1	1	ATLETIK
2	O2SN SMA Tingkat Nasional	1	1	2	1	0	0	1	ATLETIK
3	SAC Regional DKI - BANTEN	8	4	12	2	1	1	4	ATLETIK
4	SAC Nasional	2	1	3	0	0	0	0	ATLETIK
5	Kejurprov Banten	26	9	35	7	8	13	28	ATLETIK
6	Kejurnas - Solo	3	0	3	0	0	0	0	ATLETIK
7	Prabu Taekwondo Challenge 8 Nasional	1	0	1	1	1	0	2	TAEKWONDO
8	Banten Open Challenge 8 Nasioanl				0	1	6	7	TAEKWONDO
9	Perang Bintang Nasional				1	0	1	2	TAEKWONDO
10	Liga Taekwondo Pelajar Indonesia Nasional				1	0	0	1	TAEKWONDO
11	Dispora Beraksi Nasional				2	0	3	5	TAEKWONDO
12	Internasional Taekwondo Piala KASAD				1	0	0	1	TAEKWONDO
13	Ikor Untirta Provinsi	4	3	7	7	0	0	7	TAEKWONDO
14	KEJURPROV BANTEN		1	1	0	0	1	1	DAYUNG
15	KEJURDA BANTEN CABOR SHORINJI KEMPO	5	10	15	2	3	4	9	KEMPO
16	Kejurnas piala unes Semarang				0	1	5	6	wushu
17	Kejurnas wushu Surabaya				0	1	0	1	wushu
18	Kejurnas muaythai lombok						1	1	wushu
19	Kerjurda wushu tanggerang				1	5	2	8	wushu
20	Ibca piala Dankor Brimob				2	2	1	5	wushu
21	BMX FREE STYLE MALAYSIA					1		1	bmx
22	KARATE ASIA PASIFIK					1		1	karate

23	FUTSAL				3	0	0	3	
24	Winer 3rd SENKAIDO OPEN TURNAMEN INTERNASIONAL kumite U10-25 KG Female	2	3	5	5	0	0	5	
25	BMX TK NASIONAL	2	0	2	2	0	0	2	
26	PANJAT TEBING TK PROVINSI		1	1	0	1	0	1	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.248.352.182.447,00. serapan anggaran sebesar 76,26% atau terealisasi sebesar Rp. 952.019.940.949,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang menyerap 76,26% anggaran dengan catatan penyaluran BOS/BOP belum tercatat karena keterlambatan pelaporan dan ada beberapa pekerjaan yang mengalami batal paket.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2025 kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pandeglang.

4.2 Saran

Monitoring dan evaluasi kinerja perlu dilakukan secara lebih berkala dan sistematis untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai rencana serta memungkinkan dilakukan tindakan korektif secara cepat.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)

1. Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota

- Persentase Kepuasan Layanan Infrastruktur Bidang Pendidikan
Konsep/Definisi: Mengukur Kepuasan Layanan Infrastruktur Pendidikan

Interpretasi Persentase

- <70% → Kurang memuaskan
- 70–85% → Cukup memuaskan
- >85% → Sangat memuaskan

Rincian :

No.	Unsur	Rata-rata	Persentase (%)
1	Sarana Pendidikan	2,802177858	70,05
2	Prasarana Pendukung	2,66061706	66,52
3	Utilitas Dasar	3,012704174	75,32
4	Kondisi Bangunan	2,808529946	70,21
5	Meubelair	2,913793103	72,84
6	Aksesibilitas	3,058983666	76,47
7	Lingkungan	2,746823956	68,67
8	Pelayanan Infrastruktur	2,777676951	69,44
	Nilai Rata-Rata	2,861464005	
	Persentase Kepuasan	71,54	

Persentase Kepuasan : Nilai Rata-Rata x 25

Sumber Data: Hasil survei kepuasan

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pandeglang


H. DIDIN PAHRUDIN, Sos., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP 197001041995031003

Survey Kepuasan Masyarakat (Layanan Infrastruktur Bidang Pendidikan)

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang pendidikan. Jawaban Anda bersifat rahasia dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan.

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

1. Jenis Responden *

Tandai satu oval saja.

- Kepala Sekolah
- Guru
- Tenaga Kependidikan
- Orang Tua Siswa
- Komite Sekolah
- Masyarakat Umum

2. Nama Sekolah / Unit Layanan *

3. Jenjang Pendidikan *

Tandai satu oval saja.

- PAUD
- SD
- SMP

Petunjuk Pengisian

Berikan penilaian Anda dengan memilih salah satu jawaban berikut:

- 1 = Tidak Puas
- 2 = Kurang Puas
- 3 = Puas
- 4 = Sangat Puas

4. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **kondisi ruang kelas dan ruang pendukung** (ruang guru, perpustakaan, * laboratorium)?

Tandai satu oval saja.

—

1

2

3

4

—

5. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **ketersediaan dan kondisi toilet serta fasilitas pendukung lainnya?** *

Tandai satu oval saja.

—

1

2

3

4

—

6. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **ketersediaan air bersih, listrik, dan akses internet** di sekolah? *

Tandai satu oval saja.

—

1

2

3

4

—

7. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **kondisi fisik dan keamanan bangunan sekolah?** *

Tandai satu oval saja.

1

2

3

4

—

8. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **kelayakan meja, kursi, dan perlengkapan pembelajaran?** *

Tandai satu oval saja.

1

2

3

4

—

9. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **aksesibilitas dan keselamatan lingkungan sekolah?** *

Tandai satu oval saja.

1

2

3

4

—

10. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah?** *

Tandai satu oval saja.

—

1

2

3

4

—

11. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **kecepatan dan ketepatan penanganan perbaikan infrastruktur pendidikan?** *

Tandai satu oval saja.

—

1

2

3

4

—

12. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap **penanganan dan tindak lanjut pengaduan terkait infrastruktur sekolah?** *

Tandai satu oval saja.

1

2

3

4

5

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

- Persentase Satuan Pendidikan Negeri yang memiliki sarpras dengan kondisi layak

Konsep/Definisi: Mengukur ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana pendidikan

- Sarana dan Prasarana Layak: Bangunan dan fasilitas pendidikan yang memenuhi standar minimal kelayakan (struktur aman, fungsi berjalan, tidak rusak berat, dan dapat digunakan untuk pembelajaran).

Rumus :

$$\text{Persentase Satuan Pendidikan dengan Sarpras Layak} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan negeri dengan sarpras layak}}{\text{Total satuan pendidikan negeri}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Outcome} = \frac{6474}{7685} \times 100\% = 84\%$$

Sumber Data: Dapodik (29 Desember 2025)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pandeglang



H. DIDIN PAHRUDIN, Sos., M.M.

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP 197001041995031003

2. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

- Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas

Konsep/Definisi : Mengukur peningkatan prestasi Atlet yang Masuk Pelatnas

Capaian Kinerja Outcome : 13

Sumber Data : Bidang Pemuda dan Olahraga

- Rasio Wirausaha Pemuda

Konsep/Definisi : Mengukur efektivitas program pembinaan kewirausahaan pemuda

Rumus : Rasio Wirausaha Pemuda = $\frac{\text{Jumlah Wirausaha yang lolos}}{\text{Total Wirausaha Pemuda Peserta}} \times 100\%$

Capaian Kinerja Outcome : $\frac{66}{101} \times 100\% = 65\%$

Sumber Data : Bidang Pemuda dan Olahraga

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pandeglang


H. DIDIN PAHRUDIN, Sos., M.M.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 197001041995031003

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	CAPAIAN KINERJA				
1 Harapan Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	<div style="text-align: right; font-size: small;">[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Provinsi/Kabupaten/Kota</th> <th style="width: 20%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pandeglang</td> <td style="text-align: right;">7,50</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html</i></p>	Provinsi/Kabupaten/Kota	2025	Pandeglang	7,50
	Provinsi/Kabupaten/Kota		2025			
	Pandeglang		7,50			
Formulasi :	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$					
Sumber Data :	BPS					
2 Rata-Rata Lama Sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	<div style="text-align: right; font-size: small;">[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Provinsi/Kabupaten/Kota</th> <th style="width: 20%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pandeglang</td> <td style="text-align: right;">13,75</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=-/metode-baru-harapan-lama-sekolah--tahun-.html</i></p>	Provinsi/Kabupaten/Kota	2025	Pandeglang	13,75
	Provinsi/Kabupaten/Kota		2025			
	Pandeglang		13,75			
Formulasi :	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$					
Sumber Data :	BPS					
3 Rata-Rata Skor Literasi	nilai rata-rata peserta didik SD dan SMP berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	$\frac{68,92+58,46}{2} = 63,69$				
	Sumber Data :		Rapor Pendidikan (Assesmen Nasional)			
4 Rata-Rata Skor Numerasi	Nilai rata-rata peserta didik SD dan SMP berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	$\frac{66,89+58,39}{2} = 62,64$				
	Sumber Data :		Rapor Pendidikan (Assesmen Nasional)			
5 Persentase Pemuda yang Aktif dan Berperan dalam Pembangunan Daerah	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerahkepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{9381}{351007} \times 100\% = 2,67$				
	Formulasi :		$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/ kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/ kota}} \times 100\%$			
	Sumber Data :		- Bidang Pemuda dan Olahraga - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			

6	Rasio Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Kabupaten	perbandingan antara jumlah atlet yang meraih prestasi (minimal juara/medali tingkat kabupaten) dengan jumlah total atlet yang terdaftar atau dibina	$\frac{103}{219} \times 100\% = 47,03$
		Formulasi : $\text{Rasio Atlet Berprestasi} = \frac{\text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Jumlah total atlet binaan}}$ Jika dinyatakan dalam persentase: $\text{Persentase} = \text{Rasio} \times 100\%$	
		Sumber Data : - Bidang Pemuda dan Olahraga	
7	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{233}{351.007} \times 100\% = 0,66$
		Formulasi : $\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	
		Sumber Data : - Bidang Pemuda dan Olahraga - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
8	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	103
		Formulasi : Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi, nasional dan internasional	
		Sumber Data : Bidang Pemuda dan Olahraga	
9	Nilai SAKIP OPD	Mengukur Akuntabilitas Kinerja	Belum Rilis
		Formulasi : $\text{Nilai SAKIP OPD} = \sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})$	
		Sumber Data : Hasil Reviu Inspektorat	
10	Skor Literasi Membaca SD	Nilai rerata peserta didik SD berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	
		Sumber Data : Rapor Pendidikan (Assesmen Nasional)	
11	Skor Literasi Membaca SMP	Nilai rerata peserta didik SMP berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	

	Sumber Data : Rapor Pendidikan (Asesmen Nasional)	
12 Skor Numerasi SD	Nilai rerata peserta didik SD berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	SMP Umum Negeri & Swasta Sedang ↑ Capaian tahun ini 58,39%, naik 0,9 dari 2024 (57,49%)
	Sumber Data : Rapor Pendidikan (Asesmen Nasional)	
13 Skor Numerasi SMP	Nilai rerata peserta didik SD berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	SD Umum Negeri & Swasta Sedang ↑ Capaian tahun ini 66,89%, naik 9,32 dari 2024 (57,57%)
	Sumber Data : Rapor Pendidikan (Asesmen Nasional)	
14 Persentase Capaian SPM Pendidikan	tingkat keterpenuhan layanan pendidikan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan nasional	Indeks SPM Anda tahun ini 72,23 (TUNTAS PRATAMA) Kategori capaian Standar Pelayanan Minimal yang mencakup pelayanan dasar: <ul style="list-style-type: none"> • 100 (Tuntas Paripurna) • 90-99 (Tuntas Utama) • 80-89 (Tuntas Medya) • 70-79 (Tuntas Pratama) • 60-69 (Tuntas Muda) • <60 (Belum Tuntas)
	Sumber Data : Rapor Pendidikan	
15 Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	anak usia sekolah yang sebelumnya putus sekolah atau tidak terdaftar di satuan pendidikan, kemudian kembali mengikuti pendidikan	
	Formulasi $\frac{\text{Jumlah Anak yang Kembali Kesekolah}}{\text{Jumlah Anak Tidak Sekolah}} \times 100\%$	$\frac{8219}{19732} \times 100\% = 41,65$
	Sumber Data : Verval ATS	

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pandeglang



H. DIDIN PAHRUDIN, Sos., M.M.

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP 197001041995031003

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK USIA

NO	WILAYAH	ANAK USIA 5-6 THN	ANAK USIA 7-12 THN	ANAK USIA 13-15 THN	ANAK USIA 16-18 THN	PEMUDA USIA 19-30 THN
1	SUMUR	1.115	3.252	1.655	6.122	6.967
2	CIMANGGU	1.623	4.771	2.368	8.783	9.799
3	CIBALIUNG	1.523	4.218	1.993	7.719	8.618
4	CIKEUSIK	2.483	6.983	3.581	13.190	14.429
5	CIGEULIS	1.757	4.889	2.455	9.126	9.889
6	PANIMBANG	2.418	7.196	3.626	13.468	14.586
7	ANGSANA	1.166	3.434	1.661	6.410	7.390
8	MUNJUL	1.080	3.158	1.513	5.885	6.737
9	PAGELARAN	1.623	4.927	2.431	9.245	10.349
10	BOJONG	1.485	4.635	2.272	8.695	10.127
11	PICUNG	1.786	5.289	2.549	9.889	10.765
12	LABUAN	2.359	7.236	3.746	13.910	15.768
13	MENES	1.700	4.912	2.439	9.364	11.286
14	SAKETI	2.015	6.102	3.056	11.610	13.344
15	CIPEUCANG	1.329	4.081	1.994	7.733	8.841
16	JIPUT	1.490	4.316	1.924	7.801	9.100
17	MANDALAWANGI	2.530	7.418	3.594	13.701	15.401
18	CIMANUK	1.854	5.442	2.739	10.458	12.067
19	KADUHEJO	1.983	5.649	2.739	10.616	11.916
20	BANJAR	1.519	4.548	2.219	8.441	9.601
21	PANDEGLANG	1.763	5.342	2.768	10.405	11.634
22	CADASARI	1.542	4.537	2.324	8.714	10.646
23	CISATA	1.029	3.060	1.559	5.940	7.126
24	PATIA	1.226	3.746	1.847	6.966	7.677
25	KARANG TANJUNG	1.628	4.540	2.283	8.770	10.234
26	CIKEDAL	1.424	4.202	2.158	8.028	9.282
27	CIBITUNG	954	2.856	1.428	5.351	6.060
28	CARITA	1.361	4.330	2.088	7.920	8.911
29	SUKARESMI	1.627	4.772	2.281	8.880	10.064
30	MEKARJAYA	1.040	2.909	1.405	5.471	6.320
31	SINDANGRESMI	863	2.896	1.447	5.431	5.963
32	PULOSARI	1.599	4.315	2.137	8.251	9.784
33	KORONCONG	1.038	2.798	1.399	5.298	6.215
34	MAJASARI	2.544	7.427	3.550	13.825	15.052
35	SOBANG	1.458	4.344	2.166	8.244	9.059
KABUPATEN PANDEGLANG		55.934	164.530	81.394	309.660	351.007

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rangkuman Aktif Kembali - Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen

No	Kecamatan	Kel.A	Kel.B	KB	TPA	SPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6	9 Total	
1	Kec. Sumur	0	0	0	0	0	6	5	4	5	13	4	28	20	1	45	40	27	0	1	5	204
2	Kec. Cimanggu	0	0	0	0	0	17	8	2	15	27	3	23	21	4	38	26	45	0	0	7	236
3	Kec. Cibaliung	0	0	0	0	0	18	2	8	6	12	6	20	35	8	18	20	33	0	1	27	214
4	Kec. Cikeusik	0	0	0	0	0	45	7	20	32	58	10	39	33	10	41	26	54	0	1	11	387
5	Kec. Cigeulis	0	0	0	0	0	14	5	9	12	24	1	43	45	3	50	21	23	0	0	2	252
6	Kec. Panimbang	0	0	0	0	0	16	8	8	21	25	8	33	34	14	27	41	53	0	0	9	297
7	Kec. Munjul	0	0	0	0	0	8	0	3	43	15	3	17	12	6	23	27	15	0	0	2	174
8	Kec. Picung	1	0	0	0	0	13	3	6	6	27	7	28	28	4	40	32	27	0	1	32	255
9	Kec. Bojong	0	0	0	0	0	7	2	1	8	21	4	23	18	2	22	20	17	0	0	5	150
10	Kec. Saketi	1	0	0	0	0	8	5	1	11	24	27	52	43	35	46	43	55	0	2	34	387
11	Kec. Pagelaran	1	1	0	0	0	15	2	7	11	23	8	35	31	9	33	29	49	0	0	2	256
12	Kec. Labuan	1	0	0	0	0	24	4	9	20	37	7	43	23	11	35	40	42	0	6	6	308
13	Kec. Jiput	0	0	0	0	0	10	2	2	16	14	3	32	26	3	28	21	29	0	0	11	197
14	Kec. Menes	0	0	0	0	0	4	3	6	16	24	12	10	12	5	26	19	31	0	1	5	174
15	Kec. Mandalawangi	0	0	0	0	0	18	4	6	11	24	11	37	38	13	67	71	67	0	2	12	381
16	Kec. Cimanuk	0	0	0	0	0	18	5	6	10	26	9	19	35	12	37	50	52	0	2	8	289
17	Kec. Banjar	0	0	0	0	0	8	2	2	12	17	6	17	25	8	30	18	23	0	1	12	181
18	Kec. Pandeglang	0	0	0	0	0	7	0	2	6	20	15	26	31	11	32	26	34	0	0	12	222
19	Kec. Cadasari	0	0	0	0	0	3	2	4	10	13	8	35	20	9	18	46	37	0	0	9	214
20	Kec. Angsana	0	0	0	0	0	7	5	6	32	13	5	24	11	12	20	15	23	0	0	3	176
21	Kec. Karang Tanjung	0	0	0	0	0	11	2	2	16	15	9	20	23	4	32	21	28	0	0	5	188
22	Kec. Kaduhejo	0	0	0	0	0	10	5	5	11	35	14	39	25	9	43	53	46	0	1	15	311
23	Kec. Cikedal	0	0	0	0	0	4	5	11	10	25	8	19	16	7	32	14	28	0	0	5	184
24	Kec. Cipeucang	0	0	0	0	0	9	6	3	35	7	8	19	32	4	32	36	25	0	0	9	225
25	Kec. Cisata	0	0	0	0	0	7	2	3	7	10	7	19	13	1	19	11	22	0	0	2	123
26	Kec. Patia	0	0	0	0	0	12	3	6	27	18	4	33	17	3	28	21	34	0	2	2	210
27	Kec. Carita	0	0	0	0	0	9	6	8	10	17	1	32	20	0	22	21	17	0	0	2	165
28	Kec. Sukaresmi	1	0	1	0	0	10	4	7	33	17	2	20	27	7	38	49	50	0	0	10	276
29	Kec. Mekarjaya	1	0	0	0	0	8	1	1	9	18	7	21	21	3	14	20	30	0	0	3	157
30	Kec. Sindangresmi	0	0	0	0	0	12	3	2	9	14	6	24	23	6	13	8	19	0	1	5	145
31	Kec. Pulosari	0	0	0	0	0	8	1	4	9	12	6	17	26	7	66	64	59	0	0	11	290
32	Kec. Koroncong	0	0	0	0	0	0	0	1	8	10	1	14	11	3	22	28	24	0	0	1	123
33	Kec. Cibitung	0	0	0	0	0	20	2	5	2	17	5	31	28	3	31	31	21	0	3	9	208
34	Kec. Majasari	0	1	0	0	0	15	3	7	14	30	20	75	53	16	80	88	51	0	1	8	462
35	Kec. Sobang	0	0	0	0	0	23	6	3	8	28	8	27	14	7	21	23	26	0	1	3	198
-	Residu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	6	2	1	0	0	424	123	180	511	730	263	994	890	260	1169	1119	1216	0	27	304	8219

Rangkuman Individu Sekolah - Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen

No	Kecamatan	Kel.A	Kel.B	KB	TPA	SPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6	9 Total	
1	Kec. Sumur	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	6	6	7	17	45	23	1	0	80	166	364
2	Kec. Cimanggu	0	0	0	0	0	2	3	2	1	3	9	20	16	21	30	20	5	0	127	220	479
3	Kec. Cibaliung	0	0	0	0	0	0	5	0	4	4	21	15	38	33	26	46	20	0	436	249	897
4	Kec. Cikeusik	0	0	0	0	0	5	8	7	8	27	18	51	50	64	34	48	9	0	429	415	1,173
5	Kec. Cigeulis	0	0	0	0	0	0	3	5	9	11	14	23	35	53	12	15	3	0	200	267	650
6	Kec. Panimbang	0	0	0	0	0	5	9	11	11	17	17	26	49	61	21	55	13	0	219	274	788
7	Kec. Munjul	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	1	19	24	8	65	60	5	0	103	89	382
8	Kec. Picung	0	0	0	0	0	6	5	4	8	5	20	26	49	37	20	24	2	0	260	320	786
9	Kec. Bojong	0	0	0	0	0	1	3	2	8	11	18	41	27	21	39	32	3	0	261	270	737
10	Kec. Saketi	0	0	0	0	0	3	5	8	5	9	9	11	32	46	19	87	33	0	136	260	663
11	Kec. Pagelaran	0	0	0	0	0	3	3	1	2	3	2	6	5	23	17	23	3	0	101	62	254
12	Kec. Labuan	0	0	0	0	0	4	9	7	10	21	6	29	50	38	33	44	16	0	150	266	683
13	Kec. Jiput	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	3	13	11	62	70	6	0	60	119	354
14	Kec. Menes	0	0	0	0	0	4	4	1	4	2	6	7	26	47	35	56	34	0	49	187	462
15	Kec. Mandalawangi	0	0	0	0	0	4	3	3	3	9	29	27	80	39	50	31	30	0	282	407	997
16	Kec. Cimanuk	0	0	0	0	0	2	9	9	6	15	18	54	38	49	14	22	15	0	211	259	721
17	Kec. Banjar	0	0	0	0	0	2	1	2	0	4	15	21	41	41	33	16	12	0	177	216	581
18	Kec. Pandeglang	0	0	0	0	0	3	4	6	5	17	11	36	44	50	40	125	29	0	213	259	842
19	Kec. Cadasari	0	0	0	0	0	2	3	3	1	3	8	14	26	35	22	24	4	0	162	144	451
20	Kec. Angsana	0	0	0	0	0	3	1	2	3	9	3	14	8	25	2	20	13	0	121	112	336
21	Kec. Karang Tanjung	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	72	84	32	241	112	14	0	102	211	889
22	Kec. Kaduhejo	0	0	0	0	0	1	2	8	7	10	8	49	45	18	83	82	5	0	192	160	670
23	Kec. Cikedal	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	4	17	27	20	17	44	11	0	44	141	340
24	Kec. Cipeucang	0	0	0	0	0	2	0	3	5	12	3	27	41	19	11	10	6	0	206	279	624
25	Kec. Cisata	0	0	0	0	0	4	2	0	2	2	4	1	13	32	22	52	21	0	45	79	279
26	Kec. Patia	0	0	0	0	0	3	1	3	4	7	2	11	25	41	17	17	1	0	152	305	589
27	Kec. Carita	0	0	0	0	0	4	1	4	3	1	4	2	6	6	15	13	0	0	50	56	165
28	Kec. Sukaresmi	0	0	0	0	0	0	4	1	6	11	6	5	8	17	14	33	4	0	148	172	429
29	Kec. Mekarjaya	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	3	27	34	12	13	19	1	0	96	156	377
30	Kec. Sindangresmi	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	10	8	15	14	3	16	2	0	133	152	370
31	Kec. Pulosari	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	8	23	14	18	8	7	3	0	58	88	233
32	Kec. Koroncong	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	3	1	8	3	10	19	4	0	63	41	161
33	Kec. Cibitung	0	0	0	0	0	3	2	1	5	10	7	6	9	33	18	10	2	0	323	111	540
34	Kec. Majasari	0	0	0	0	0	3	11	4	11	16	4	23	83	55	60	62	56	0	257	241	886
35	Kec. Sobang	0	0	0	0	0	3	5	8	8	14	8	21	49	40	21	35	10	0	98	260	580
Jumlah	Jumlah	0	0	0	0	0	76	115	122	168	300	314	742	1,119	1,079	1,172	1,372	396	0	5,744	7,013	19,732

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Hj. Raden Dewi Setiani.S.Sos.,MA
Jabatan : Bupati Pandeglang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pandeglang, November 2025

Pihak Kedua,
BUPATI PANDEGLANG

Hj. Raden Dewi Setiani.S.Sos.,MA

Pihak Pertama,
PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH

H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP. 197001041995031003

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP OPD	71,55	71,50
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Skor Literasi Membaca SD	60,10	60,10
		Skor Literasi Membaca SMP	62,70	62,70
		Skor Numerasi SD	54,69	54,69
		Skor Numerasi SMP	59,53	59,53
		Persentase Capaian SPM Pendidikan	72,22	72,23
		Persentase Anak Tidak Sekolah yang kembali Bersekolah	28,77	28,77
3.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kemandirian ekonomi	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,66	0,66
4.	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh minimal di tingkat Provinsi	100	100
5.	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	50,55	50,55

Sasaran Strategis ini di dukung oleh Program:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 982.457.096.962	Rp. 946.071.071.947
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 303.158.142.824	Rp. 296.859.220.000
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 563.264.500	Rp. 563.084.500
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 300.000.000	Rp. 491.620.000
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 4.584.206.000	Rp. 4.492.586.000
JUMLAH		Rp. 1.291.062.710.286	Rp. 1.248.477.582

Pihak Kedua,
BUPATI PANDEGLANG

Hj. Raden Dewi Setiani.S.Sos.,MA

Pandeglang. November 2025

Pihak Pertama,
PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH

H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP. 197001041995031003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nono Suparno, SH
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, 03 November 2025
Pihak Pertama,



H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003



Nono Suparno, SH
NIP.196811221990031002

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	99,58	99,58
		Iklm Inklusivitas SMP	58,66	58,66
		Iklm Kebhinekaan SMP	70,15	70,15
		Iklm Keamanan SMP	70,46	70,46

Sasaran Program ini di dukung oleh Kegiatan:

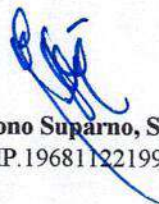
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 86.832.306.824	Rp 85.300.685.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 86.832.306.824	Rp 85.300.685.000
JUMLAH		Rp 86.832.306.824	Rp 85.300.685.000

Pihak Kedua,



H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,



Nono Suparno, SH
NIP.196811221990031002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Munawar, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, November 2025
Pihak Pertama,

H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Wawan Munawar, S.T
NIP.198011072010011012

LAMPIRAN PERJANJIAN

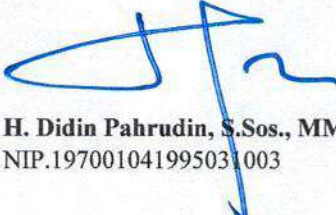
KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	99,58	99,58
		Iklim Inklusivitas SD	60,85	60,85
		Iklim Kebhinekaan SD	69,78	99,58
		Iklim Keamanan SD	77,29	77,29

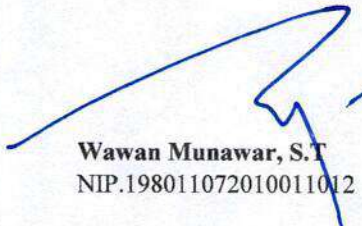
Sasaran Program ini di dukung oleh Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 176.301.023.000	Rp 173.659.212.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 176.301.023.000	Rp 173.659.212.000
JUMLAH		Rp 176.301.023.000	Rp 173.659.212.000

Pihak Kedua,


H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,


Wawan Munawar, S.T
NIP.198011072010011012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nono Suparno, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, November 2025
Pihak Pertama,

H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Nono Suparno, SH
NIP.196811221990031002

LAMPIRAN PERJANJIAN

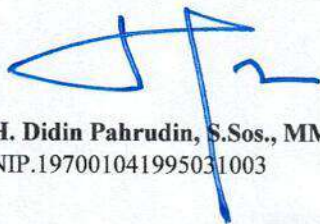
KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	99,58	99,58
		Iklim Inklusivitas SMP	58,66	58,66
		Iklim Kebhinekaan SMP	70,15	70,15
		Iklim Keamanan SMP	70,46	70,46

Sasaran Program ini di dukung oleh Kegiatan:

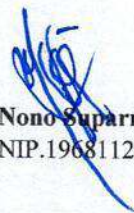
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 86.832.306.824	Rp 173.659.212.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 86.832.306.824	Rp 173.659.212.000
JUMLAH		Rp 86.832.306.824	Rp 173.659.212.000

Pihak Kedua,



H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,



Nono Suparno, SH
NIP.196811221990031002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Karna Suyana, SH., MM
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,

H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

R. Karna Suyana, SH., MM
NIP.198102092010011009

LAMPIRAN PERJANJIAN


KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	79,15	79,15
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan	23,32	23,32
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	46,04%	46,04%

Sasaran Program ini di dukung oleh Kegiatan:

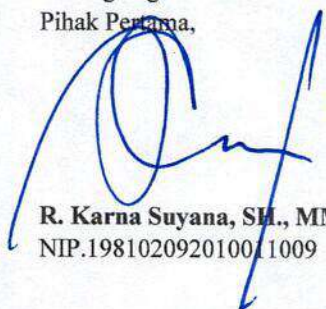
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 40.024.813.000	Rp 37.899.323.000
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 23.176.618.000	Rp 23.019.309.000
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 16.848.195.000	Rp 14.880.014.000
JUMLAH		Rp 40.024.813.000	Rp 37.899.323.000

Pihak Kedua,



H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,



R. Karna Suyana, SH., MM
NIP.198102092010011009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mu'min Sueb, S.Sos., MM.
Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,

H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

H. Mu'min Sueb, S.Sos., MM.
NIP.196803161991031007

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	0,24	0,24
		Indeks Distribusi Guru SMP	0,48	0,48
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	73,42%	73,42%
		Indeks Distribusi Guru SD	0,38	0,38
		Indeks Distribusi Guru PAUD	0,35	0,35
		Proporsi PTK SD bersertifikat	26,2%	26,2%
		Proporsi PTK SMP bersertifikat	26	26
		Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	42,66%	42,66%


Sasaran Program ini di dukung oleh Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 23.176.618.000	Rp 563.084.500
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 23.176.618.000	Rp 563.084.500
JUMLAH		Rp 23.176.618.000	Rp 563.084.500

Pihak Kedua,


H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,


H. Mu'min Sueb, S.Sos., MM.
NIP.196803161991031007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usep Sakhyana Syaefullah,ST
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,

Usep Sakhyana Syaefullah,ST
NIP.197708052011011003

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	10	10
2.	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	10	10

Sasaran Program ini di dukung oleh Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 300.000.000	Rp 491.620.000
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp 300.000.000	Rp 491.620.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 300.000.000	Rp 563.084.500
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 300.000.000	Rp 399.374.082
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 200.000.000	Rp 169.900.000
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 860.000.000	Rp 886.215.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp 3.124.206.000	Rp 2.937.096.918
	JUMLAH	Rp 300.000.000	Rp 491.620.000

Pihak Kedua,


H. Didin Pahrudin, S.Sos., MM
NIP.197001041995031003

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,


Usep Sakhyan Syaefullah, ST
NIP.197708052011011003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tb. Achmad Fitriana, SE., MM
Jabatan : Kasi Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

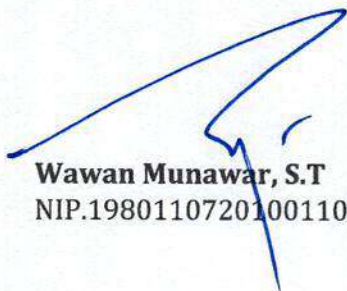
Nama : Wawan Munawar, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

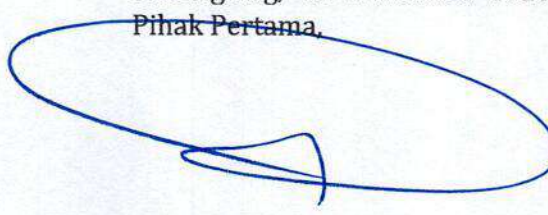
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,


Wawan Munawar, S.T
NIP.198011072010011012

Pandeglang, 03 November 2025

~~Pihak Pertama,~~

Tb. Achmad Fitriana, SE., MM
NIP.198011102005011011

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			AWAL	PERUBAHAN	SATUAN
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	5	Ruang
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	74	15	Ruang
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	31	15	Ruang
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	55	50	unit
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	4	Ruang
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21	15	Ruang
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	465	181	Paket
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36	25	Ruang
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	17	unit
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40	38	Ruang
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	52	12	Paket		

Sasaran Kegiatan ini di dukung oleh Sub Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 46.161.448.000	Rp 173.659.212.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 46.161.448.000	Rp 173.659.212.000
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 1.092.550.000	Rp 1.094.350.000
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 2.235.815.000	Rp 2.219.449.500
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 3.431.700.000	Rp 3.395.200.000
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 8.262.440.000	Rp 8.520.483.412
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 611.028.000	Rp 601.699.500
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 2.450.560.000	Rp 2.427.560.000
7	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 4.707.189.000	Rp 4.872.617.000
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 9.798.950.000	Rp 9.990.553.295
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 2.190.830.000	Rp 1.906.288.000
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 9.863.130.000	Rp 13.409.595.293
11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 1.517.256.000	Rp 1.487.256.000
JUMLAH		Rp 46.161.448.000	Rp 49.925.052.000

Pihak Kedua,


Wawan Munawar, S.T
NIP.198011072010011012

Pandeglang, 3 November 2025

Pihak Pertama,


Tb. Achmad Fitriana, SE., MM
NIP.198011102005011011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatulloh,S.Sos
Jabatan : Kasi Kurikulum Sekolah Dasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wawan Munawar, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

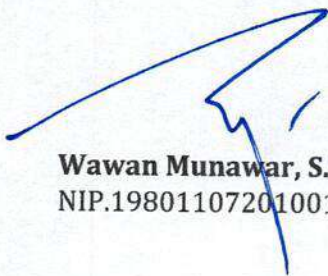
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

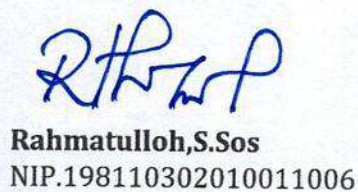
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, 03 November 2025
Pihak Pertama,



Wawan Munawar, S.T
NIP.198011072010011012



Rahmatulloh, S.Sos
NIP.198110302010011006

LAMPIRAN PERJANJIAN

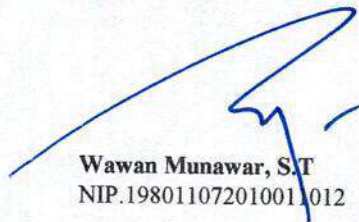
KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			AWAL	PERUBAHAN	SATUAN
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	860	871	Peserta Didik
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	871	873	Satuan Pendidikan
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	871	873	Satuan Pendidikan
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40	60	orang
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	9	Dokumen
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200	132000	Peserta Didik

Sasaran Kegiatan ini di dukung oleh Sub Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 130.139.575.000	Rp 173.659.212.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 130.139.575.000	Rp 173.659.212.000
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 950.000.000	Rp 949.650.000
2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 121.311.785.000	Rp 121.311.785.000
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 800.000.000	Rp 512.700.000
4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Rp 200.000.000	Rp 237.055.000
5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 598.100.000	Rp 570.650.000
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 6.279.690.000	Rp 152.320.000
	JUMLAH	Rp 130.139.575.000	Rp 123.734.160.000

Pihak Kedua,



Wawan Munawar, S.T
NIP.198011072010011012

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,



Rahmatulloh, S.Sos
NIP.198110302010011006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atang Sandjaya, SE
Jabatan : Kasi PAUD dan PNF

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

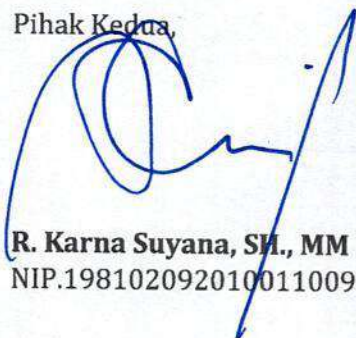
Nama : R. Karna Suyana, SH., MM
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

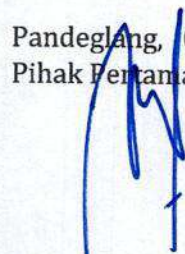
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,



R. Karna Suyana, SH., MM
NIP.198102092010011009

Pandeglang, 03 November 2025
Pihak Pertama,



Atang Sandjaya, SE
NIP.196907081990031005

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			AWAL	PERUBAHAN	SATUAN
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	21	13	Unit
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	18	27	Unit
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	0	Peserta Didik
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	733	285	Satuan Pendidikan
		Jumlah Sekolah PAUD Mengelola Dana BOP	733	755	Satuan Pendidikan
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	32	135	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	2	Dokumen
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10	7	Ruang
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48	8	Unit
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	48	9	Paket
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	7	Ruang

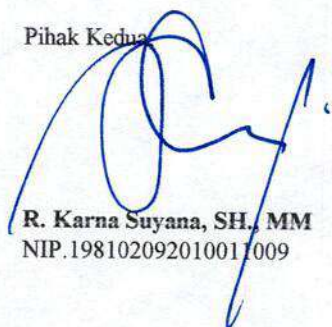
2.	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200	0	Peserta Didik
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	1143	Satuan Pendidikan
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	800	46	Lembaga
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32	140	Orang

Sasaran Kegiatan ini di dukung oleh Sub Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 40.024.813.000	Rp 37.899.323.000
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 23.176.618.000	Rp 23.019.309.000
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 1.428.450.000	Rp 1.702.239.000
2	Pengadaan Mebel PAUD	Rp 441.294.000	Rp 408.906.345
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp 103.395.000	-
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 200.000.000	Rp 176.636.000
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 15.736.194.000	Rp 15.736.194.000
6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 250.000.000	Rp 219.450.000
7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 95.500.000	Rp 66.770.280
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 1.579.738.000	Rp 1.571.715.775
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 907.875.000	Rp 816.187.000
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp 1.227.122.000	Rp 1.245.892.600
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 1.207.050.000	Rp 1.075.318.000

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 16.848.195.000	Rp 14.880.014.000
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp 22.095.000	-
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 6.172.000.000	Rp 4.264.300.000
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 10.404.100.000	Rp 10.404.100.000
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 250.000.000	Rp 211.614.000
JUMLAH		Rp 40.024.813.000	Rp 37.899.323.000

Pihak Kedua



R. Karna Suyana, SH, MM
NIP.198102092010011009

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama



Atang Sandjaya, SE
NIP.196907081990031005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usep Sakhyana, ST
Jabatan : Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

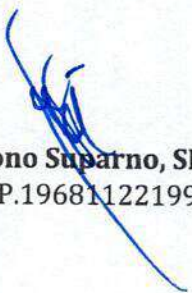
Nama : Nono Suparno, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,


Nono Suparno, SH.
NIP.196811221990031002

Pandeglang, 03 November 2025
Pihak Pertama,


Usep Sakhyana, ST
NIP.197708052011011003

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

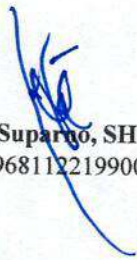
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			AWAL	PERUBAHAN	SATUAN
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	3	Ruang
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	39	2	Ruang
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	174	12	Unit
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50	128	Ruang
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	3	Ruang
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	2	Ruang
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	21	Unit
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	140	250	Paket
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	5	Ruang
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	14	Ruang
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10	5	Paket

Sasaran Kegiatan ini di dukung oleh Sub Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 36.113.615.824	Rp 36.016.514.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 36.113.615.824	Rp 36.016.514.000
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 673.200.000	Rp 669.750.000
2	Pembangunan Laboratorium	Rp 1.016.150.000	Rp 976.586.800
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 1.654.638.824	Rp 1.996.850.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 19.651.630.000	Rp 18.918.546.800
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	Rp 705.150.000	Rp 605.000.000

6	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp 277.800.000	Rp 539.000.000
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 1.927.325.000	Rp 1.830.432.500
8	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 5.056.250.000	Rp 5.056.250.000
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 1.506.800.000	Rp 1.317.775.900
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 3.361.700.000	Rp 3.741.000.000
11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 282.972.000	Rp 282.972.000
JUMLAH		Rp 36.113.615.824	Rp 36.016.514.000

Pihak Kedua,


Nono Suparno, SH.
 NIP.196811221990031002

Pandeglang, 03 November 2025

Pihak Pertama,


Usep Sakhyana, ST
 NIP.197708052011011003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Kusuma Bakti,S.AP
Jabatan : Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nono Suparno, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama

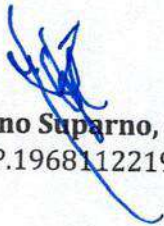
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

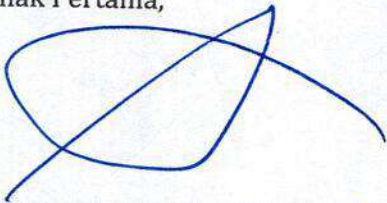
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, 03 November 2025
Pihak Pertama,


Nono Suparno, SH.
NIP.196811221990031002


Agung Kusuma Bakti,S.AP
NIP.197708052011011003

LAMPIRAN PERJANJIAN

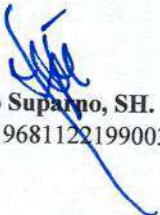
KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			AWAL	PERUBAHAN	SATUAN
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2900	663	Peserta Didik
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1059	916	Peserta Didik
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20	174	Orang
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10	174	Orang
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	115	174	Satuan Pendidikan
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	167	174	Satuan Pendidikan
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	167	672	Orang
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500	672	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	115	Dokumen
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	174	Dokumen

Sasaran Kegiatan ini di dukung oleh Sub Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 86.832.306.824	Rp 49.284.171.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 86.832.306.824	Rp 49.284.171.000
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 1.794.320.000	Rp 359.800.000
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 855.000.000	Rp 855.000.000
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
4	Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 245.000.000	Rp 245.000.000
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 46.757.871.000	Rp 46.757.871.000
7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
8	Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 250.500.000	Rp 250.500.000
9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 226.000.000	Rp 226.000.000
10	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	JUMLAH	Rp 50.718.691.000	Rp 49.284.171.000

Pihak Kedua,


Nono Suparno, SH.
NIP.196811221990031002

Pandeglang, 03 November 2025

Pihak Pertama,


Usep Sakhyana, ST
NIP.19770805201011003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyvan Dwindi Fahsyaluvi, S.Pd
Jabatan : Kasi PTK PAUD, SD, SMP dan PNF

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Mu'min Sueb, S.Sos., MM.
Jabatan : Kepala Bidang Ketenagaan

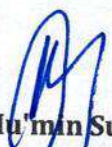
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

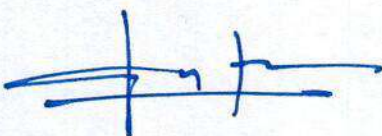
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Pandeglang, 03 November 2025
Pihak Pertama,


H. Mu'min Sueb, S.Sos., MM.
NIP.196803161991031007


Riyvan Dwindi Fahsyaluvi, S.Pd
NIP.198306052010011014

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			AWAL	PERUBAHAN	SATUAN
1.	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	3	Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	2	Laporan

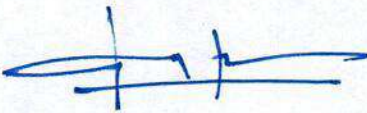
Sasaran Kegiatan ini di dukung oleh Sub Kegiatan:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 563.264.500	Rp 563.084.500
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 563.264.500	Rp 563.084.500
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 338.454.500	Rp 408.939.500
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 224.810.000	Rp 154.145.000
JUMLAH		Rp 563.264.500	Rp 563.084.500

Pihak Kedua,

Pandeglang, 3 November 2025
Pihak Pertama,


H. Mu'min Sueb, S.Sos., MM.
NIP.196808161991031007


Riyvan Dwindi Fahsyaluvi, S.Pd
NIP.198306052010011014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukron Mulyadi, S.Sos.MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nono Suparno, SH.
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pihak Kedua,

Nono Suparno, SH.
NIP.196811221990031002

Pandeglang, 03 November 2025
Pihak Pertama,

Sukron Mulyadi, S.Sos.MM
NIP.197704202007011009

LAMPIRAN PERJANJIAN

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			AWAL	PERUBAHAN	SATUAN
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	Laporan
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Berita Acara
2.	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	14	Laporan
	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan			


4.	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12	Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	Paket
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	Dokumen
5.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan
6.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	unit

Sasaran Kegiatan ini di dukung oleh Sub Kegiatan:

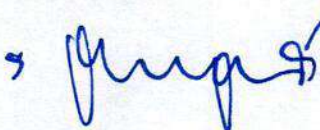
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 982.457.096.962	Rp 946.071.071.947
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37.300.000	Rp 82.740.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp 5.500.000	Rp 7.550.000

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 3.500.000	Rp 4.900.000
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.800.000	Rp 50.050.000
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Rp 10.000.000	Rp 4.640.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 978.539.226.962	Rp 941.733.462.447
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 978.522.626.962	Rp 941.716.862.447
2	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
3	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 22.100.000	Rp 22.100.000
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 22.100.000	Rp 22.100.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 426.250.000	Rp 655.245.900
1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp 18.860.000	Rp 18.860.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp 301.195.900
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 19.295.000	Rp 19.295.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 256.955.000	Rp 238.845.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21.300.000	Rp 22.600.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 100.000.000	Rp 30.000.000
7	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 9.840.000	Rp 24.450.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.312.220.000	Rp 3.209.623.600
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 188.000.000	Rp 196.400.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 396.000.000	Rp 446.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.728.220.000	Rp 2.567.223.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 120.000.000	Rp 367.900.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Revisi	Rp 60.000.000	Rp 93.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 40.000.000	Rp 234.900.000
	JUMLAH	982.434.996.962	946.048.971.947

Pihak Kedua,


Nono Suparno, SH.
 NIP.196811221990031002

Pandeglang, 03 November 2025
 Pihak Pertama,



Sukron Mulyadi, S.Sos.MM
 NIP.197704202007011009